



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 374 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS  
DINAS PETERNAKAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018 - 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Peternakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- peta proses;
  - peta sub proses;
  - peta relasi; dan
  - peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 29 OKTOBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 374 / KEP / HK / 2021**  
**TANGGAL : 29 Oktober 2021**

**PETA PROSES BISNIS**  
**DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2018-2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan pertanian yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian dan Terwujudnya reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Reformasi birokrasi, Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik untuk mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian dan meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana. hal ini juga sesuai dengan misi kelima Pemerintah Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2018-2023 yaitu untuk penyediaan aparatur yang profesionalisme dan handal dalam rangka inovasi dan percepatan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas dengan menerapkan kemajuan teknologi dan industri peternakan dari hulu sampai hilir dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu perlu adanya penerapan instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan sehingga pembangunan peternakan dapat tercapai sesuai Misi Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil maka dengan harapan pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern dapat Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan ferormasi birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan

perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

## 1.2 TUJUAN

Tujuan Penyusunan peta proses bisnis pada instansi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Bidang, seksi, sub bagian dan kepala UPT untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi Organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
- 2) Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
- 3) memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini

menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- 1) mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu
- 2) proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah
- 3) memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

### **1.3 Dasar Hukum**

Landasan Hukum dalam Penyusunan peta proses bisnis Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- c) RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023
- d) Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Di Provisini Nusa Tenggara Timur 2018-2023.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi Tahun 2018-2023.

## BAB II

### VISI , MISI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

#### 2.1. Visi

Visi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 adalah: "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" dengan Sistem *SMART TOP*." Semangat Melayani Dengan Cepat, Ramah Dan Terbuka Untuk Produktifitas Ternak.

#### 2.2. Misi

Penelahan atas Misi Pembangunan secara operasional Dinas Peternakan untuk NTT Bangkit dengan Peningkatan Kapasitas dan New Inisiatif serta NTT Sejahtera dijabarkan sebagai berikut :

**Misi 1** : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Implementasi atas Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu Menciptakan kemandirian dan Stabilitas perekonomian daerah, Persentase pertumbuhan ekonomi, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada Kisaran 23,57 - 28,28 % dan Peningkatan Nilai tambah Petani Peternak (NTP) pada kisaran Poin 111 – 127. Strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Merujuk kepada Prioritas Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Petani Peternak ini melalui Peningkatan Produksi bibit benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan ekspor

melalui peningkatan nilai tambah dengan indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada kisaran 6,78 %.

**Misi 2** : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

Dukungan Pencapaian Misi II Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah IV, untuk Bidang Peternakan diimplementasikan dalam upaya Peningkatan Nilai Tambah Industri Kecil dan rantai nilai pasok produk peternakan (daging dan olahannya) sehingga dapat memenuhi permintaan jasa kuliner sebagai *unsur Amenities* sesuai target kunjungan wisatawan 3 juta dan target lama hunian pariwisata 4 hari. Hal ini diarahkan dengan mendukung sektor industri kecil rakyat / rumah tangga dalam pengolahan produk berbasis Pengolahan dan bernuansa kekuatan budaya lokal.

**Misi 3** : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir. Dalam Konteks pembangunan Peternakan, adalah memperoleh dukungan melibatkan pemangku kepentingan untuk penguatan akses melalui upaya penyiapan infrastruktur sumber daya air, akses jalan menuju kawasan peternakan dan sentra peternakan rakyat sekaligus memperkuat dan memperlancar rantai pasok hulu – hilir peternakan.

**Misi 4** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dalam bidang Peternakan maka secara khusus Misi ini diimplementasikan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan keahlian menyikapi perkembangan industri, produksi dan produktivitas peternakan dan pakan ternak untuk mampu mencapai target populasi dan kebutuhan lokal serta regional diantaranya

ketersediaan daging ayam, telur ayam dan industri pengolahan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan.

**Misi 5** : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan aparatur yang profesionalisme dan handal dalam rangka inovasi dan percepatan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas dengan menerapkan kemajuan teknologi dan industri peternakan dari hulu sampai hilir dan berorientasi pada hasil.

Penetapan program pembangunan disesuaikan dengan misi pembangunan daerah yang pelaksanaannya didasarkan sesuai karakteristik wilayah dengan pendekatan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan melalui program prioritas yang dilaksanakan dengan titik berat kebijakan pelaksanaan menurut spesifikasi kebutuhan pembangunan. Program Prioritas dalam Urusan Pertanian yang menjadi tugas Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Sedangkan Memasuki periode Pembangunan jangka menengah 2020-2024 Kementerian Pertanian R.I menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dengan Visi "Pertanian yang Maju, mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan Misi yaitu : (1) Mewujudkan ketahanan pangan; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta (3) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas adalah (1) Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan dengan salah satu indikatornya yaitu ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Thn 2024); (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian dengan salah satu indikatornya yaitu NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024), serta (3) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri;
- 2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional;
- 3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
- 4) Termanfaatkan inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja persentase hasil pertanian yang dimanfaatkan dan teknologi yang diterapkan oleh pertanian;
- 5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan dan indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan;
- 6) Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan dengan indikator kinerja persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan menular strategis;
- 7) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelmbagaan pertanian Nasional, dengan indikator kinerja

persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dan persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian,

Selaras dengan visi dan misi Kementerian Pertanian R.I tersebut, maka pembangunan peternakan di NTT pun tidak dapat dilakukan sepihak oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di Pemerintah Pusat, wilayah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Kebijakan Kementerian Pertanian R.I dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5(lima) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Terjaganya ketahanan pangan Nasional; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; (3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; (4) Meningkatkan kualitas SDM pertanian; dan (5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi yang ditempuh yaitu : 1) Strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional; 2) Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; 4) Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM Pertanian; 5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima;

Tabel 1. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Peternakan Provinsi NTT

VISI : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak besar, kecil dan unggas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi peternakan melalui pengembangan sapi wagyu, babi, kambing dan unggas;</li> <li>• Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia peternakan;</li> <li>• Pembangunan infrastruktur pabrik pakan ternak sebagai penunjang ekonomi di sektor hulu dan hilir.</li> </ul>	Klasterisasi wilayah pengembangan ternak berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi dan produktifitas ternak besar, kecil dan unggas, serta pengembangan pusat-pusat perbibitan ternak dan peningkatan kualitas SDM peternakan.
	Meningkatnya presentase prasarana ternak yang memenuhi standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan koordinasi, kerjasama kemitraan dan kelembagaan peternakan.</li> </ul>	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan.
	Meningkatnya jumlah ternak yang sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamanan sumber daya peternakan dan Penguatan Otoritas Veteriner.</li> </ul>	Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan secara terpadu dan berkesinambungan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Meningkatkan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.	Pertumbuhan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan industri pengolahan untuk menghasilkan nilai tambah produk olahan yang tinggi;</li> <li>b. Pengembangan industri pengolahan hasil peternakan;</li> <li>c. Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan;</li> <li>d. Mendorong peternakan integrasi hulu dan hilir.</li> </ol>	Menguatkan pembinaan dan pengawasan veteriner dalam rangka penjaminan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis.

### 2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Peternakan Provinsi NTT merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi NTT yang beralamat di Jln. Veteran – Kelurahan Fatululi – Kupang. Berdasarkan peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomor 01 tahun 2019 tentang perubahan atas perda nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTT dan peraturan gubernur NTT nomor 78 tahun 2016, tugas dan fungsi dinas peternakan provinsi NTT yaitu:

- 1) Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang peternakan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang peternakan; dan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

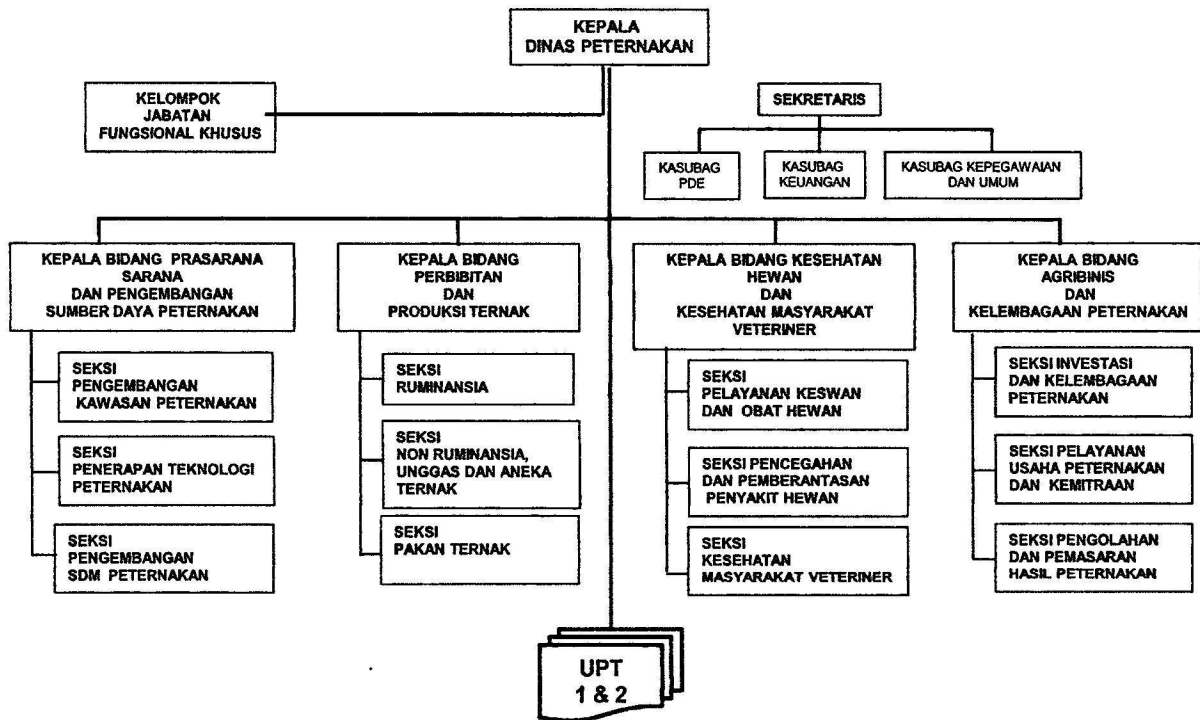
Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bentuk terakhir berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan mengacu pada Peraturan Gubernur NTT nomor 62 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur pada Perangkat daerah Provinsi NTT, serta Peraturan Gubernur NTT nomor 55 Tahun 2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Peternakan Provinsi

Nusa Tenggara Timur, dengan Struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan
  - Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan
  - Seksi Penerapan Teknologi Peternakan
  - Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Peternakan
4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
  - Seksi Ternak Ruminansia
  - Seksi Ternak Non Ruminansia, Unggas dan Aneka Ternak
  - Seksi Pakan Ternak
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan
  - Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
  - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan
  - Seksi Investasi dan Kelembagaan Usaha Peternakan
  - Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Kemitraan
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
7. UPT Veteriner
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Seksi Laboratorium Veteriner
  - Seksi Pelayanan Veteriner
8. UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Seksi Pembibitan Ternak
  - Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak
9. Jabatan Fungsional  
Meliputi jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik

Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Perencana, Arsiparis, Penyuluh, Pengawas Mutu Hasil Peternakan.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berikut ini disampaikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan seperti tertuang pada Tabel 2 pada tabel berikut.

Tabel 2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspek prasarana sarana dan sumber daya peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketersediaan sumber air</li> <li>• Kurangnya ketersediaan hijauan pakan ternak berkualitas sepanjang tahun</li> <li>• Ketergantungan pakan konsentrat/ pellet dari luar NTT</li> <li>• Berkurangnya lahan padang penggembalaan ternak</li> <li>• Belum adanya Status hukum kawasan peternakan</li> <li>• Tersedianya teknologi dukungan infrastruktur sarana dan prasarana</li> <li>• Belum tersedianya Pabrik pakan ternak/ pengolah pakan ternak Skala besar, sedang dan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan bendungan, embung, sumur dan jaringan irigasi</li> <li>• Pengembangan industri pakan ternak</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan teknologi pakan ternak</li> <li>• Optimalisasi padang penggembalaan</li> <li>• Penguatan manajemen pemeliharaan ternak yang intensif</li> <li>• Zonasi padang penggembalaan melalui pemetaan kawasan Pengembangan kebun pakan Ternak melalui pola integrasi pertanian terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kab./ Kota</li> <li>• Kebijakan anggota Dewan di daerah Keteredaaan dukungan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketersediaan sumber air untuk pembangunan peternakan</li> <li>• Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak</li> <li>• Ketergantungan pakan ternak (pellet dan konsentrat) dari luar NTT</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya peternakan</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan mutu pakan ternak belum optimal</li> <li>• Terbatasnya jumlah pengawas mutu pakan ternak</li> </ul>

Tabel 3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspek perbibitan dan produksi ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pemeliharaan ternak sebagian besar masih secara non intensif maupun</li> <li>• Belum terpenuhinya kebutuhan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik)</li> <li>• Penurunan kualitas bibit ternak</li> <li>• Ketergantungan bibit ayam ras pedaging dan petelur dari luar NTT</li> <li>• Peningkatan kualitas bibit ternak terus diupayakan Adanya peningkatan usaha budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penggunaan SDM, sarana, prasarana, dan dana yang dimiliki</li> <li>• Penumbuhan dan pengembangan pusat-pusat pembibitan ternak (<i>breeding farm</i>)</li> <li>• Revitalisasi pusat perbibitan peternakan daerah</li> <li>• Penguatan sentra peternakan rakyat</li> <li>• Pemberdayaan kelompok tani ternak</li> <li>• Pengembangan teknologi reproduksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pemerintah pusat pemerintah Kabupaten/ Kota</li> <li>• Kebijakan anggota Dewandi daerah</li> <li>• Ketersediaan dukungan anggaran</li> <li>• Komitmen pemerintah dalam meningkatkan penyediaan bibit ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih minimnya jumlah pembibitan ternak yang intensi dan berkelanjutan</li> <li>• Ketergantungan bibit ayam broileran petelur dari luar NTT</li> <li>• Program pembibitan ternak di masyarakat membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama</li> <li>• Program pembibitan ternak kurang memberikan keuntungan yang memadai</li> <li>• Terbatasnya jumlah SDM fungsional Pengawas bibit ternak, pengawas, tenaga teknis IB, PKB, ATR dan petugas recording</li> </ul>

Tabel 4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya kasus penyakit hewan menular strategis</li> <li>• Masih adanya obat hewan yang Beredar belum terdaftar</li> <li>• Masih adanya rumah potong hewan yang dikelola pemerintah belum memenuhi persyaratan</li> <li>• Belum optimalnya penerapan kesejahteraan hewan di RPH</li> <li>• Masih adanya produk hewan yang beredar belum memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis</li> <li>• Penguatan Isikhn dan website database pembangunan peternakan</li> <li>• Pengembangan sarana pelayanan kesehatan hewan (Rumah sakit hewan, klinik hewan dan puskesmas)</li> <li>• Pembangunan, Pembinaan dan fasilitasi RPH</li> <li>• Sertifikasi NKV</li> <li>• Kemampuan laboratorium untuk pengujian produk hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pemerintah pusat pemerintah Kabupaten/ kota</li> <li>• Kebijakan anggota Dewandi daerah</li> <li>• Ketersediaan dukungan anggaran</li> <li>• Komitmen pemerintah dalam meningkatkan penyediaan bibit temak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya fasilitas dan SDM (medik dan paramedik veteriner) pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>• Belum adanya inovasi pemetaan dan pengendalian penyakit temak dan hewan, khususnya berbasis teknologi informasi secara on-line</li> <li>• Kurangnya jumlah RPH</li> </ul>

Tabel 5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspek agribisnis dan kelembagaan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lalu lintas hewan masih sulit diawasi</li> <li>• Lalu lintas produk hewan masih sulit diawasi</li> <li>• Sebagian besar peternak dengan keterampilan yang belum memuaskan serta dengan motivasi ekonomi dalam usaha masih Rendah dan dilakukan sebagai usaha sampingan saja</li> <li>• Kurangnya kontribusi teknologi pasca panen dalam meningkatkan pendapatan petani</li> <li>• Belum terbentuknya kelembagaan peternakan yang baik</li> <li>• Kurangnya modal untuk mengembangkan Usaha peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya regulasi yang mewadahi pengawasan lalu lintas produk hewan</li> <li>• Tim pengawasan terpadu</li> <li>• Pembangunan holding ground</li> <li>• Penguatan SDM dan kelembagaan serta sarana penunjang pengawasan</li> <li>• Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pemerintah pusat pemerintah Kabupaten/ Kota</li> <li>• Kebijakan anggota Dewandi daerah</li> <li>• Ketersediaan dukungan anggaran</li> <li>• Komitmen pemerintah dalam meningkatkan penyediaan bibit ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya introduksi teknologi pengolahan hasil ternak (pasca panen)</li> <li>• Belum adanya pabrik pengolahan daging</li> </ul>

#### **2.4. Program dan Kegiatan**

Merujuk pada klasifikasi program dan kegiatan dalam APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Program pembangunan daerah yang menjadi tugas OPD Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup tiga (4) program, tujuh (11) kegiatan dan dua belas (12) sub kegiatan, yakni :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan
- c. Administrasi Umum
- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

##### **2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;**

- a. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
  - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi;
  - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.
- b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi;
  - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
  - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan;
  - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak.
- c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Pertanian.
3. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;**
- a. Penataan Prasarana Pertanian.
- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya;
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
4. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi;
- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.
- c. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan.
- Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan.

### BAB III PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Prinsip penyusunan peta proses bisnis pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. **Definitif**, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. **Urutan**, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. **Pelanggan atau pengguna layanan**, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. **Nilai tambah**, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. **Keterkaitan**, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. **Fungsi silang**, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. **Sederhana representatif**, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. **Konsensus subyektif**, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

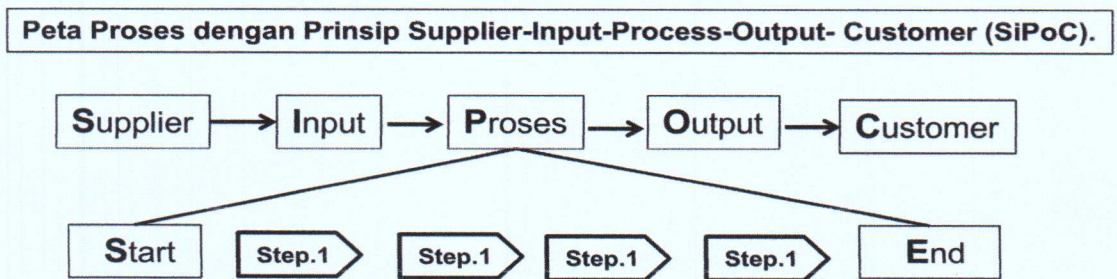
Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b) analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c) kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d) setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;

- e) setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f) untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g) berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

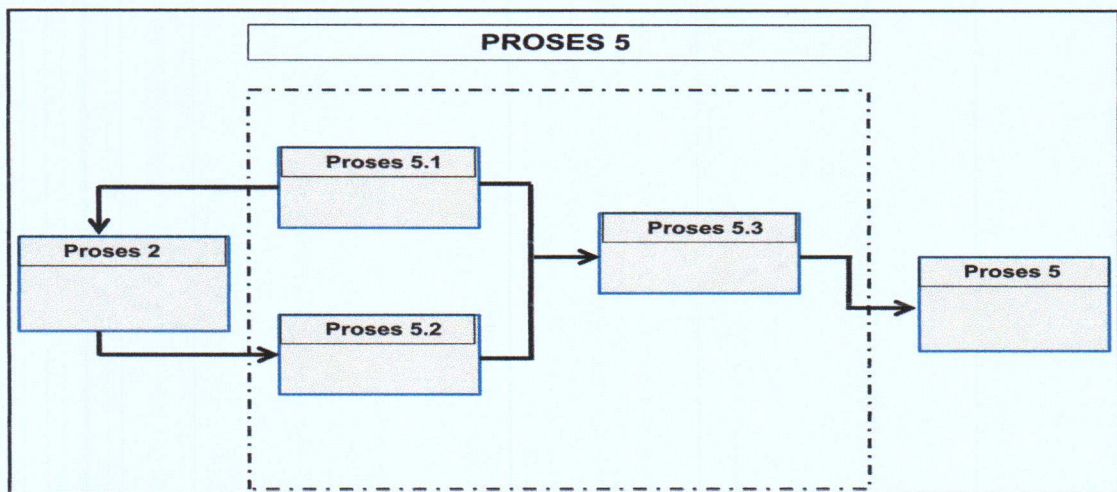
Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar Peta Proses adalah sebagai berikut:

a. Peta Proses



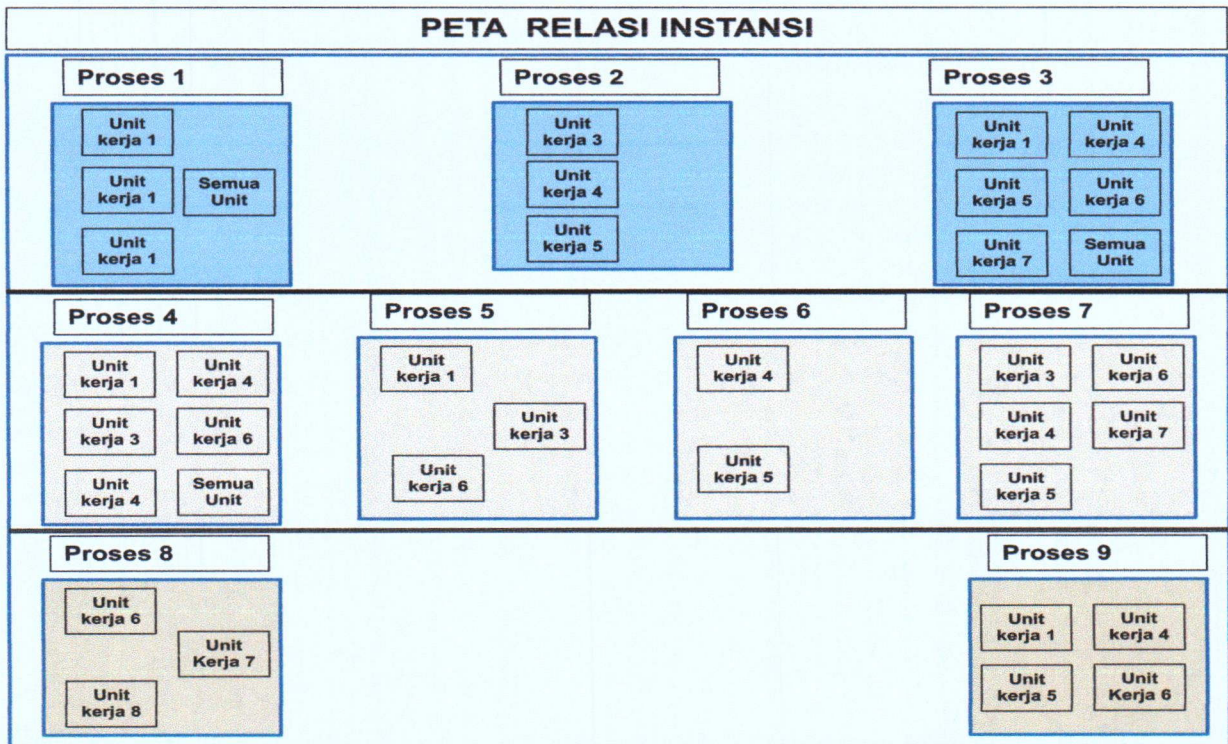
Gambar 2. Peta Proses SIPOC

b. Peta Sub Proses



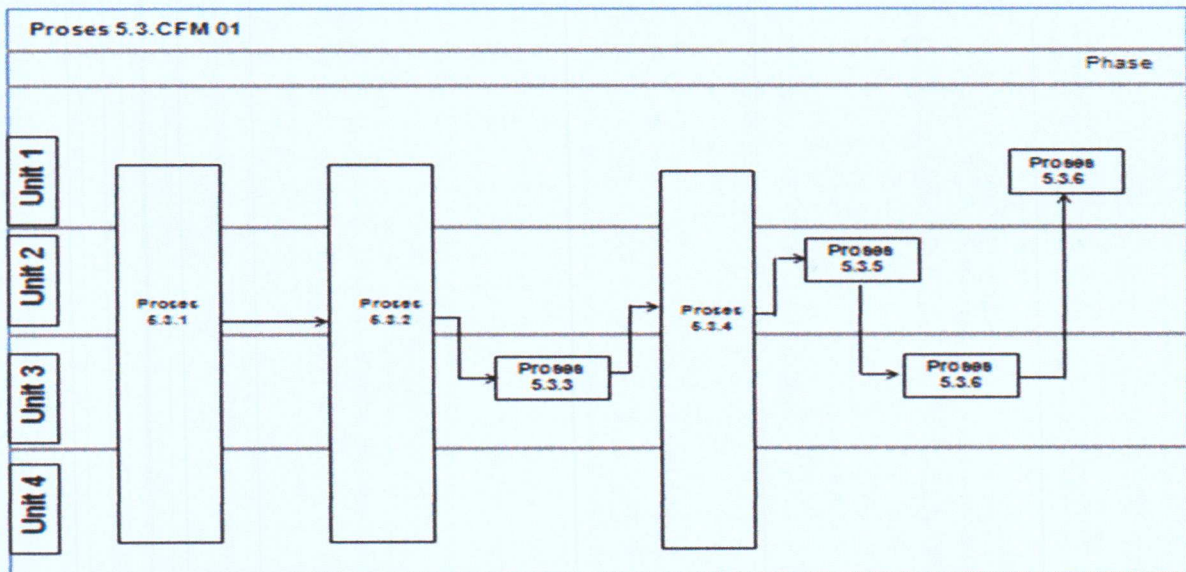
Gambar 3 . Peta Sub Proses

c. Peta Relasi



Gambar 4. Peta Relasi

d. Peta Lintas Fungsi



Gambar 5. Peta Lintas Fungsi

Penyusunan peta proses bisnis Dinas Peternakan dilaksanakan dengan 4 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas/aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

3. Permasalahan organisasi Dinas Peternakan

Berdasarkan Penentuan Isu-Isu Strategis maka telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait pada bidang Peternakan sebagai berikut:

Permasalahan yang masih akan dihadapi dalam pembangunan sub sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain mencakup aspek prasarana sarana dan sumber daya peternakan, aspek perbibitan dan produksi ternak, aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta aspek agribisnis dan kelembagaan peternakan. Berikut ini disampaikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan seperti pada tabel berikut.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Provinsi NTT, terkait dengan dinamika perkembangan masalah pembangunan peternakan di Provinsi NTT

baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis, yaitu:

- a. Menurunnya kualitas bibit ternak;
- b. Masih minimnya jumlah usaha pembibitan ternak yang intensif dan berkelanjutan, serta lemahnya SDM;
- c. Ketergantungan bibit ayam Broiler pedaging dan petelur dari luar NTT;
- d. Untuk mengurangi ketergantungan akan pakan ternak (pellet dan konsentrat) dari luar NTT perlu dibangun pabrik pakan ternak yang dapat memenuhi kebutuhan di NTT;
- e. Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak sehingga perlu adanya database pemetaan potensi ternak, lahan padang penggembalaan dan lahan hijauan pakan ternak yang *ter-update* secara on-line;
- f. Kurangnya dukungan untuk pengawasan lalulintas ternak, hewan dan produk hasil ternak;
- g. Kurangnya introduksi teknologi pengolahan hasil ternak (pasca panen) dan belum adanya pabrik pengolahan daging;
- h. Kurangnya jumlah rumah potong hewan;
- i. Masih minimnya jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar;
- j. Penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan menular strategis termasuk inovasi pemetaan dan pengendalian penyakit ternak dan hewan, khususnya berbasis teknologi informasi secara on-line.

Untuk menentukan Isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Peternakan Provinsi NTT dengan mengacu pada Analisis *SWOT* sebagai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana dibidang Peternakan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, maka perlu mengidentifikasi Faktor-faktor Eksternal maupun Internal dalam pencapaian Tujuan Tercapainya Peningkatan kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB dan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.

**Tabel 6.** Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi NTT Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN);	Kurangnya sentra industri Pengolahan Hasil Peternakan dan Akses Industri Kreatif	- Sentra Pelayanan dan fasilitas Informasi dan Jasa - RPH	- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota - Kebijakan anggota Dewan di daerah - Ketersediaan dukungan anggaran
2	Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	Minimnya Sentra Breeding Farm Sapi, Kuda dan Kerbau dan Industri pengolahan	Pelayanan dan fasilitas Informasi dan Jasa	- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota - Kebijakan anggota Dewan di daerah - Ketersediaan dukungan anggaran
3	PKW	- Industri Pakan ternak - Pengolahan Produk ternak - Pusat Layanan kesehatan Hewan dan RPH Mini - Home Industri berbasis Produk Peternakan (Kulit, tanduk, tulang)	- Pelayanan fasilitas Informasi dan Jasa - Pemenuhan Standard Layanan Keswan	- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota - Kebijakan anggota Dewan di daerah - Ketersediaan dukungan anggaran
4	PKW(p)	- Industri Pakan ternak - Pengolahan Produk ternak - Home Industri berbasis Produk Peternakan (Kulit, tanduk, tulang)	- Layanan Pemeriksaan status kesehatan Hewan - Layanan Kualitas produk	- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota - Kebijakan anggota Dewan di daerah - Ketersediaan dukungan anggaran
5	PKL	- Industri Pakan ternak - Pengolahan Produk ternak - Pusat Layanan kesehatan Hewan - Home Industri berbasis Produk Peternakan (Kulit, tanduk, tulang) - Meat Shop - Kuliner	- Pelayanan fasilitas Informasi dan Jasa - Pemenuhan Standard Layanan Keswan	- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota - Kebijakan anggota Dewan di daerah - Ketersediaan dukungan anggaran
6	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);	- Sentra Industri Pengolahan Hasil Peternakan Pakan ternak - Industri Kreatif	- Sentra Pelayanan dan fasilitas Informasi dan Jasa	- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota - Kebijakan anggota Dewan di daerah - Ketersediaan dukungan anggaran

**Tabel 7. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

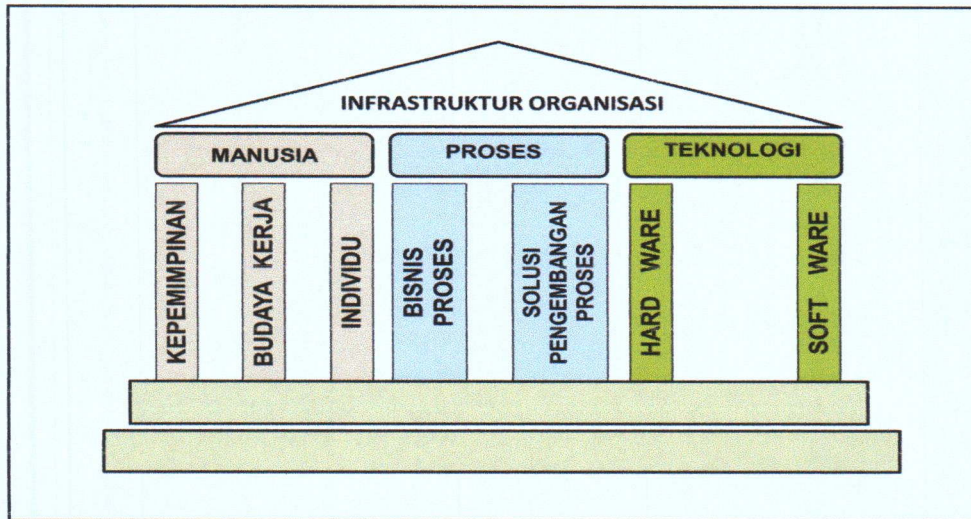
No	KLHS terkait tugas pokok dan fungsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung LH untuk pembangunan.	Daya dukung dan daya tampung LH untuk pengembangan pembangunan peternakan	Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Kebijakan anggota Dewan di daerah</li> <li>- Ketersediaan dukungan anggaran</li> </ul>
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Diperlukan Sumberdaya genetik dan ketahanan pangan asal ternak yang berdaulat dan mandiri melalui produksi dan produktivitas peternakan di seluruh wilayah.	Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Kebijakan anggota Dewan di daerah</li> <li>- Ketersediaan dukungan anggaran</li> </ul>
3	Kinerja layanan/ jasa ekosistem	Belum sepenuhnya kinerja layanan ekosistem memenuhi kebutuhan pengembangan pangan	Perubahan fungsi lahan peternakan menjadi pemukiman atau industri mengancam kecukupan penyediaan pangan hewani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Kebijakan anggota Dewan di daerah</li> <li>- Ketersediaan dukungan anggaran</li> </ul>
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Sumber daya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan usaha peternakan	Perubahan fungsi lahan peternakan menjadi pemukiman atau industri mengancam kecukupan penyediaan pangan hewani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Kebijakan anggota Dewan di daerah</li> <li>- Ketersediaan dukungan anggaran</li> </ul>
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim belum sepenuhnya disikapi dengan benar Khususnya musim panas dan hujan masih menimbulkan kebakaran dan banjir yang mengancam terhadap ketahanan pangan dan peternakan	Perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Kebijakan anggota Dewan di daerah</li> <li>- Ketersediaan dukungan anggaran</li> </ul>
6	Tingkat ketahanan dan potensi sumber daya hayati	Masih diperlukan pelestarian sumber daya hayati yang mendukung pangan dan usaha peternakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Kebijakan anggota Dewan di daerah</li> <li>- Ketersediaan dukungan anggaran</li> </ul>

## BAB IV

### PETA PROSES BISNIS

#### 4.1. Sistem Pilar Organisasi

Dalam menyusun Peta Proses Bisnis Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dahulu membuat pemetaan terkait dengan hubungan antara manusia, Proses dan Teknologi sebagai berikut:



Gambar 6. Hubungan antara pilar organisasi

#### 4.2 Analisis Peta Proses Bisnis Dinas Peternakan

Sasaran, indikator sasaran dan Program Kegiatan Dinas Peternakan dapat dilihat pada Tabel 8.

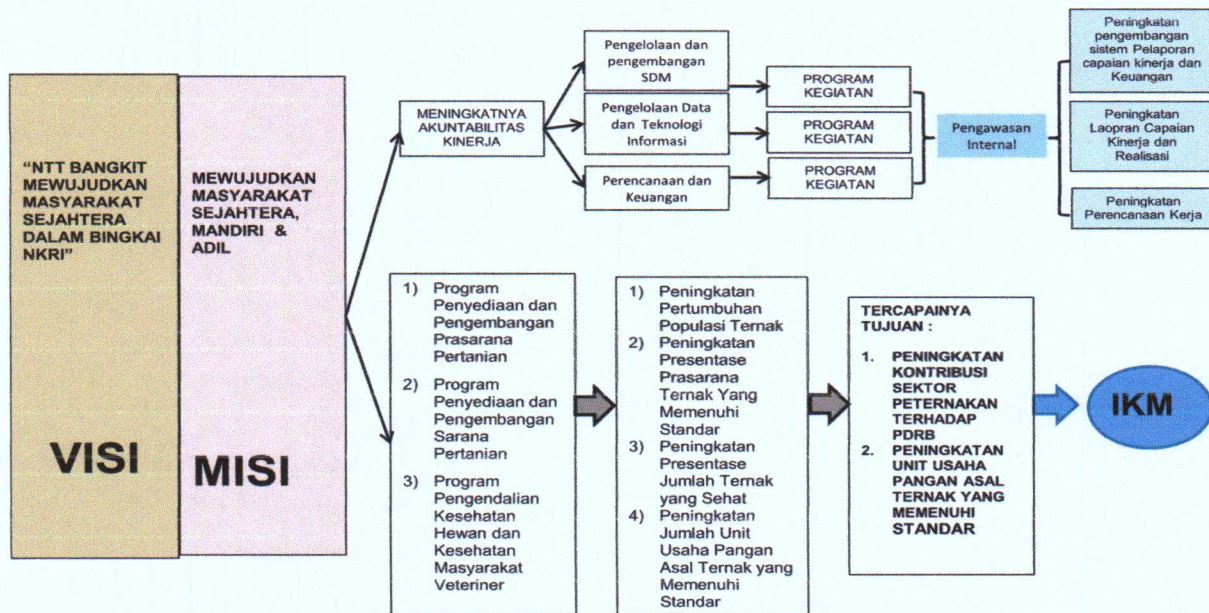
Tabel 8. Sasaran, Indikator dan Program Kegiatan Dinas Peternakan Provinsi NTT

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan	
	Administrasi Umum	
Presentase temuan hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti	Predikat LAKIP	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan, tertibnya belanja dan pendapatan, monev aset dan legalitas
		Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja OPD Dinas Peternakan
		Pengelolaan standar akuntansi pemerintah (SAP), administrasi
		Peningkatan pengembangan sistem

		<p>pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja OPD Dinas Peternakan</p> <p>Penyusunan perencanaan kerja OPD Dinas Peternakan</p> <p>Penyusunan Profil OPD Dinas Peternakan</p> <p>Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan OPD Dinas Peternakan</p>
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	<p>Pelayanan Administrasi perkantoran</p> <p>Penyediaan jasa langganan, keamanan, kebersihan</p> <p>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p> <p>Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya</p> <p>Pengelolaan kepegawaian</p> <p>Penataan peraturan perundang-undangan, kajian peraturan</p> <p>Pengelolaan website</p>
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Ternak Besar, Kecil Dan Unggas	<p>Peningkatan Persentase Populasi Ternak sampai pada Akhir Tahun 2023 yaitu :</p> <p>1) Ternak Besar 7% (awal Populasi pada Rentra 2018)</p> <p>2) Ternak Kecil 11,8% (awal Populasi pada Rentra 2018)</p> <p>3) Ternak Unggas 6,2% (awal Populasi pada Rentra 2018)</p>	<p><b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b> dengan kegiatan yaitu :</p> <p>1) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</p> <p>2) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</p> <p>3) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah prov. Lain</p>
Meningkatnya Presentase Prasarana Ternak Yang Memenuhi Standar	Peningkatan Presentase prasarana ternak yang memenuhi standar > 80%	<p><b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b> dengan kegiatan yaitu :</p> <p>1) Peningkatan Penataan Prasarana Pertanian</p>
Meningkatnya jumlah ternak yang sehat	Peningkatan presentase jumlah ternak yang sehat dari populasi >80%	<p><b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b> dengan kegiatan yaitu :</p> <p>1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p> <p>2) Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</p>
Meningkatkan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	<p>Pertumbuhan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar</p> <p>Presentase peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 60%.</p>	<p><b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b> dengan kegiatan yaitu :</p> <p>1) Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha produk hewan</p>
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan masyarakat

### 4.3. Sistem Bagan peta Proses Bisnis

Proses bisnis mengacu Visi misi sasaran, dan indikator sasaran serta program pada Dinas Peternakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7. Analisis Alur bisnis proses secara umum sesuai visi, misi sasaran dan indikator sasaran dinas Peternakan.

Penurunan level operasional pada Dinas Peternakan selanjutnya dapat diturunkan menjadi bagan sebagai berikut:

Tabel 9. Penurunan Level Sasaran pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan
		Administrasi Umum
	Presentase temuan hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan, tertibnya belanja dan pendapatan, monev aset dan legalitas
		Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja OPD Dinas Peternakan
		Pengelolaan standar akuntansi pemerintahan (SAP), administrasi
	Predikat LAKIP	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

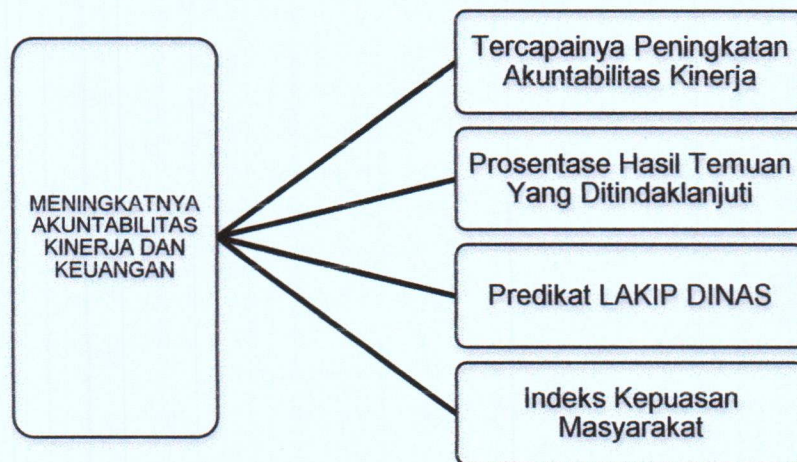
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja OPD Dinas Peternakan
		Penyusunan perencanaan kerja OPD Dinas Peternakan
		Penyusunan Profil OPD Dinas Peternakan
		Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan OPD Dinas Peternakan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Pelayanan Administrasi perkantoran
		Penyediaan jasa langganan, keamanan, kebersihan
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya
		Pengelolaan kepegawaian
		Penataan peraturan perundang-undangan, kajian peraturan
		Pengelolaan website
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Ternak Besar, Kecil Dan Unggas	Peningkatan Persentase Populasi Ternak sampai pada Akhir Tahun 2023 yaitu : 1) Ternak Besar 7% (awal Populasi pada Rentra 2018) 2) Ternak Kecil ↑1,8% (awal Populasi pada Rentra 2018) 3) Ternak Unggas 6,2% (awal Populasi pada Rentra 2018)	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b> dengan kegiatan yaitu : 1) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 2) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 3) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah prov. lain
Meningkatnya Presentase Prasarana Ternak Yang Memenuhi Standar	Peningkatan Presentase prasarana ternak yang memenuhi standar > 80%	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b> dengan kegiatan yaitu : 1) Peningkatan Penataan Prasarana Pertanian
Meningkatnya jumlah ternak yang sehat	Peningkatan presentase jumlah ternak yang sehat dari populasi >80%	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b> dengan kegiatan yaitu : 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2) Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
Meningkatkan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Pertumbuhan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar Presentase peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 60%,	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b> dengan kegiatan yaitu : 1) Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha produk hewan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan masyarakat

Penurunan level pada Dinas Dinas Peternakan selanjutnya dapat diturunkan menjadi bagan sebagai berikut:

Tabel 10. Analisis Penurunan Level Sasaran, Indikator Sasaran dan Program

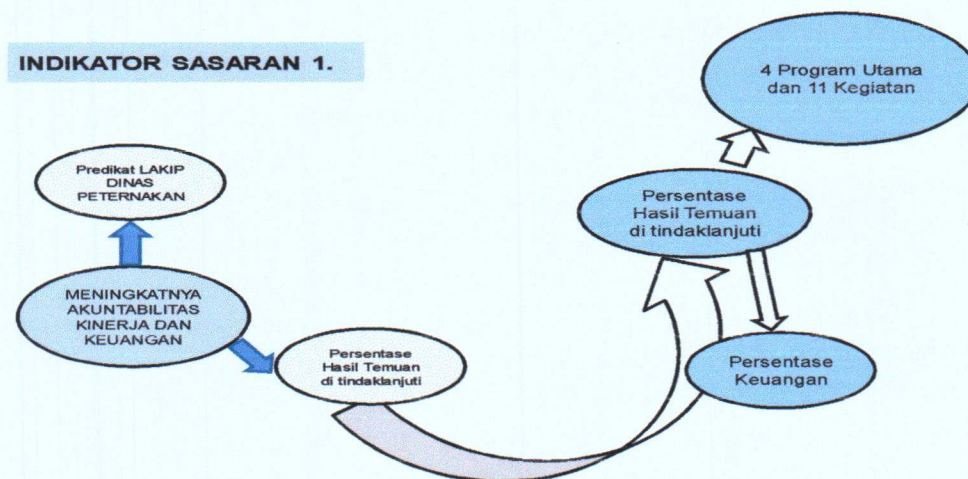
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Administrasi Keuangan			
		Administrasi Umum			
	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan di Bidang PSP		
			Program laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bidang PSP		
	Predikat LAKIP DINAS	program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bidang PSP	penyusunan perencanaan kinerja Bidang PSP		
			penyusunan dan pengendalian evaluasi perencanaan Bidang, penyusunan perencanaan Bidang PSP,		
			Penyusunan RENJA sesuai Renstra Dinas		
			Penyusunan Profil Bidang		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan administrasi Bidang PSP	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
					program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Program penataan peraturan perundang-undangan / Regulasi				
	program komunikasi informasi dan Sistem IT				
	program penyelamatan arsip				
	program peningkatan kualitas pelayanan publik				

Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan diturunkan menjadi 4 Indikator sasaran yaitu Tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, predikat LAKIP Dinas Peternakan Provinsi NTT, , Prosentase hasil temuan yang ditindaklanjuti, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari tabel diatas tersebut masing-masing kemudian diturunkan ke level operasional sebagai berikut:



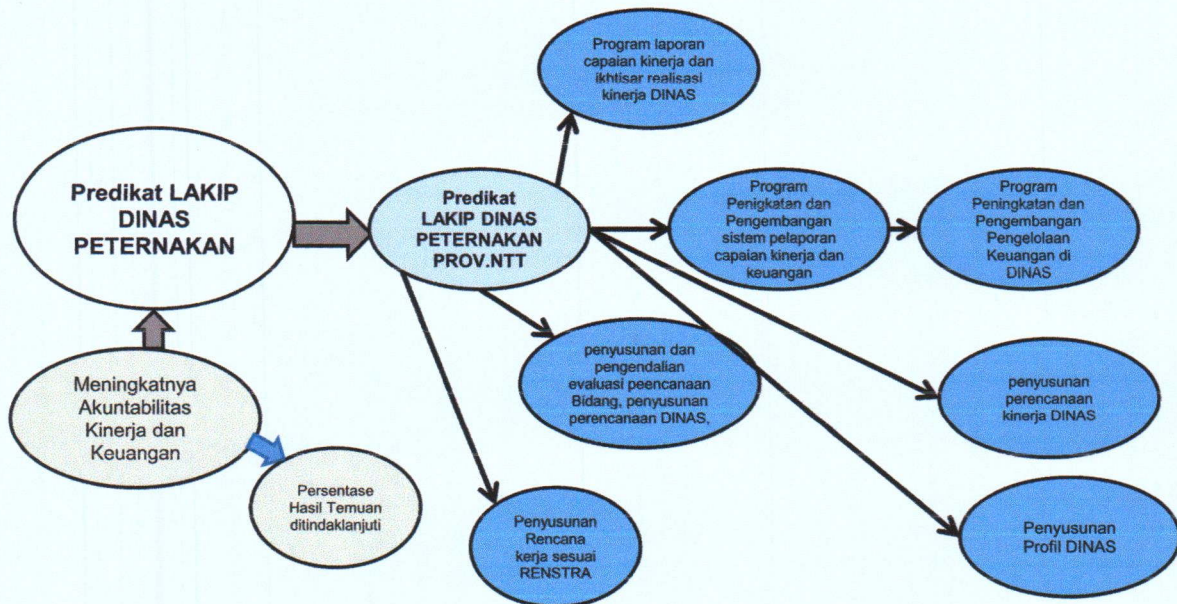
Gambar 8. Alur Sasaran Meningkatkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Selanjutnya dari indikator sasaran prosesentase hasil temuan ditindaklanjuti dibuat peta bisnis program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan. Hal ini tergambarkan pada proses sebagai berikut:



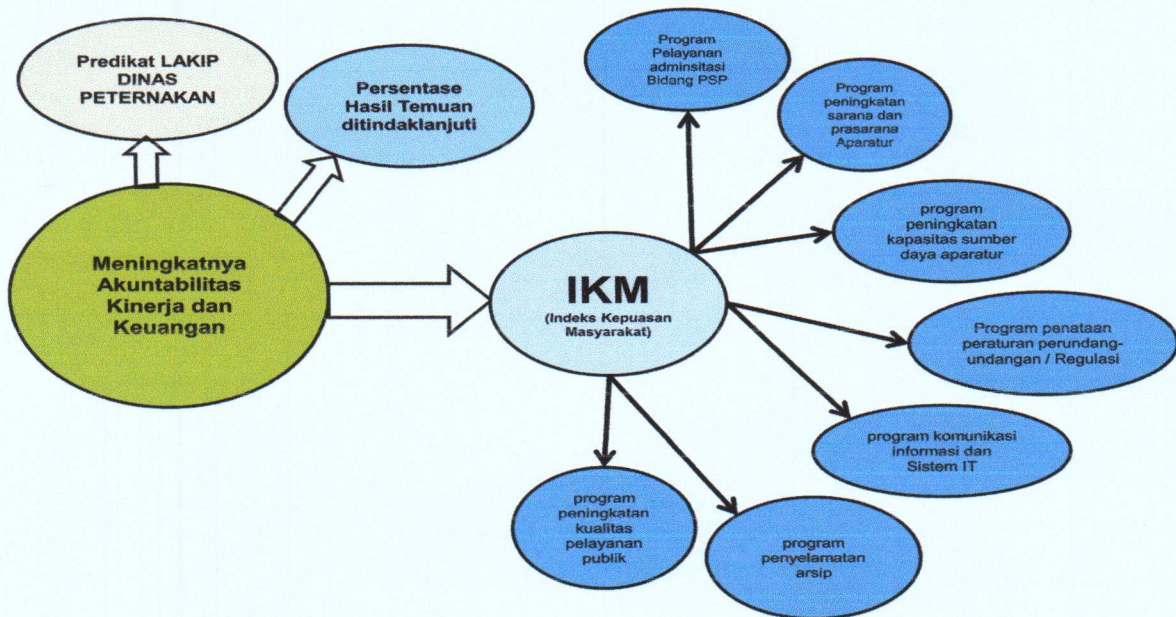
Gambar 9. Alur bisnis program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Selanjutnya dari indikator sasaran predikat LAKIP Dinas Peternakan Provinsi NTT dibuat peta bisnis **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yaitu program laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas, program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas, penyusunan perencanaan kinerja Dinas, penyusunan dan pengendalian evaluasi perencanaan Dinas, penyusunan perencanaan Dinas, Penyusunan Profil Dinas, dan Penyusunan RENJA sesuai Renstra Dinas. Hal ini tergambarkan pada proses sebagai berikut:



Gambar 10. Alur Predikat LAKIP DINAS

Selanjutnya dari indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Peternakan Provinsi NTT dibuat peta bisnis program sebanyak 7 program yaitu Program pelayanan administrasi Dinas, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program penataan peraturan perundang-undangan, program komunikasi informasi dan Sistem IT, program penyelamatan arsip dan program peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tergambarkan pada proses sebagai berikut:



Gambar 11. Alur indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

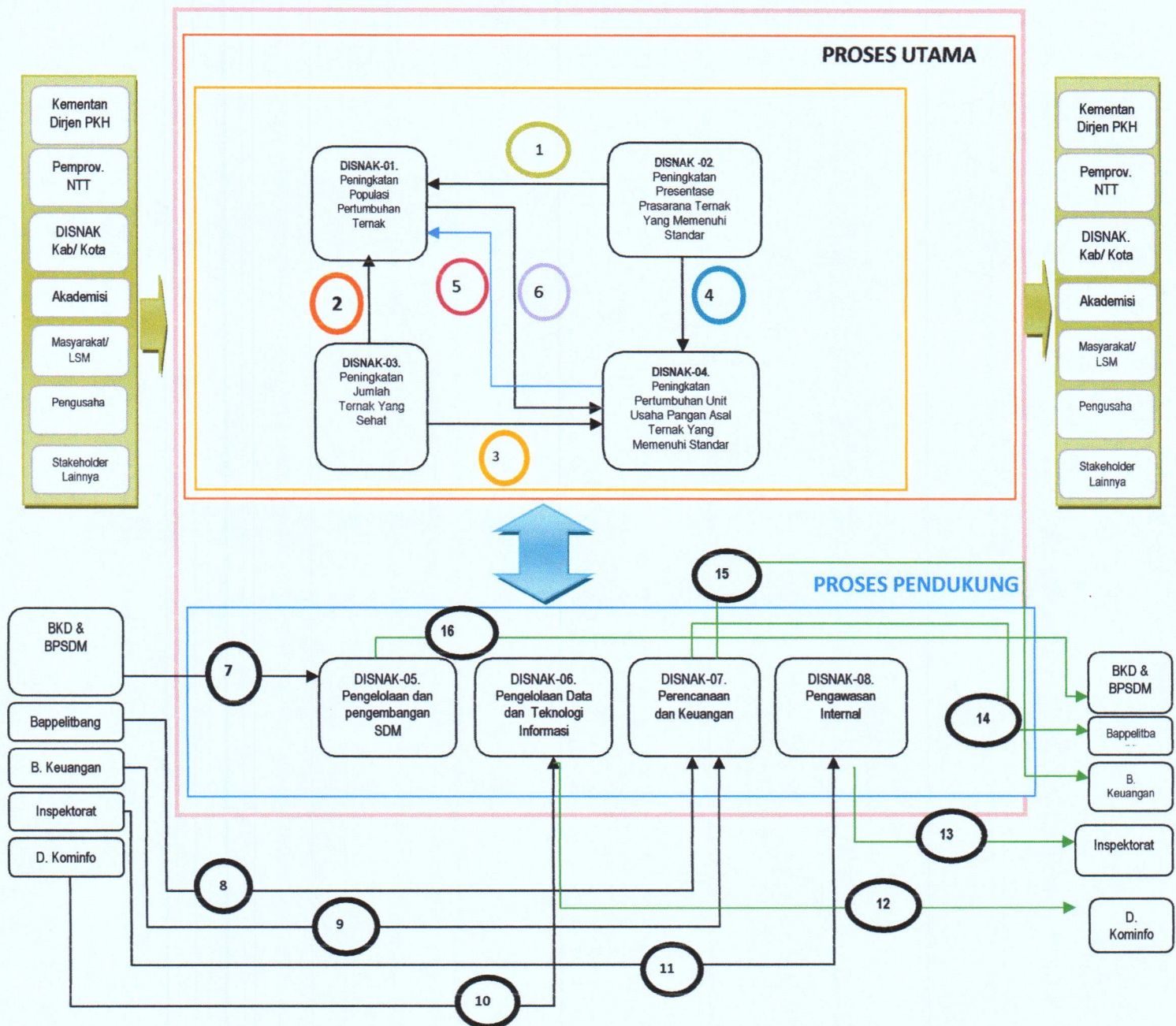
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama pada Dinas Peternakan Provinsi NTT maka ditetapkan 4 (empat) Proses Utama sebagaimana dalam table 11 berikut:

Tabel 11. Identifikasi Peta Proses Bisnis Utama Dinas Peternakan Provinsi NTT

No	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas	UTAMA	DISNAK. 01
2.	Peningkatan Presentase Prasarana Ternak yang Memenuhi Standar	UTAMA	DISNAK. 02
3.	Peningkatan Jumlah Ternak yang Sehat	UTAMA	DISNAK. 03
4.	Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak yang Memenuhi Standar	UTAMA	DISNAK. 04

#### 4.4 PETA PROSES BISNIS DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :



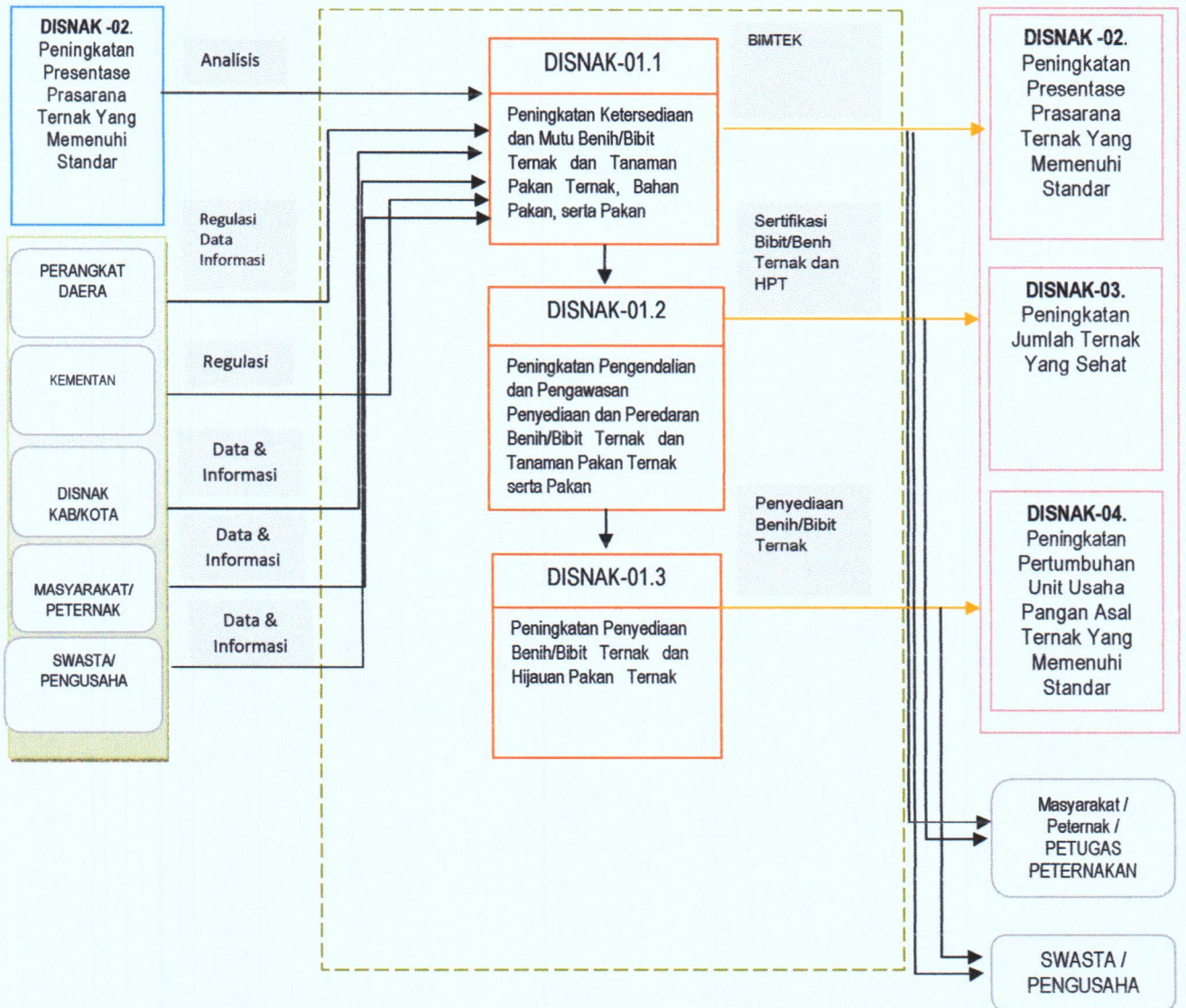
Penjelasan Proses :

1. Peningkatan Presentase Prasarana Ternak Yang Memenuhi Standar mempengaruhi Peningkatan Populasi Pertumbuhan Ternak;
2. Peningkatan Jumlah Ternak Yang Sehat mempengaruhi Peningkatan Populasi Pertumbuhan Ternak;
3. Peningkatan Jumlah Ternak Yang Sehat juga berdampak pada Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak Yang Memenuhi Standar;
4. Peningkatan Presentase Prasarana Ternak Yang Memenuhi Standar dapat mempengaruhi Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak Yang Memenuhi Standar;
5. Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak Yang Memenuhi Standar mempengaruhi Peningkatan Populasi Pertumbuhan Ternak;
6. Peningkatan Populasi Pertumbuhan Ternak juga berdampak pada Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak Yang Memenuhi Standar;
7. Data Kepegawaian sebagai bahan Pengelolaan dan pengembangan SDM;
8. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
9. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
10. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
11. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
14. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
15. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
16. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.

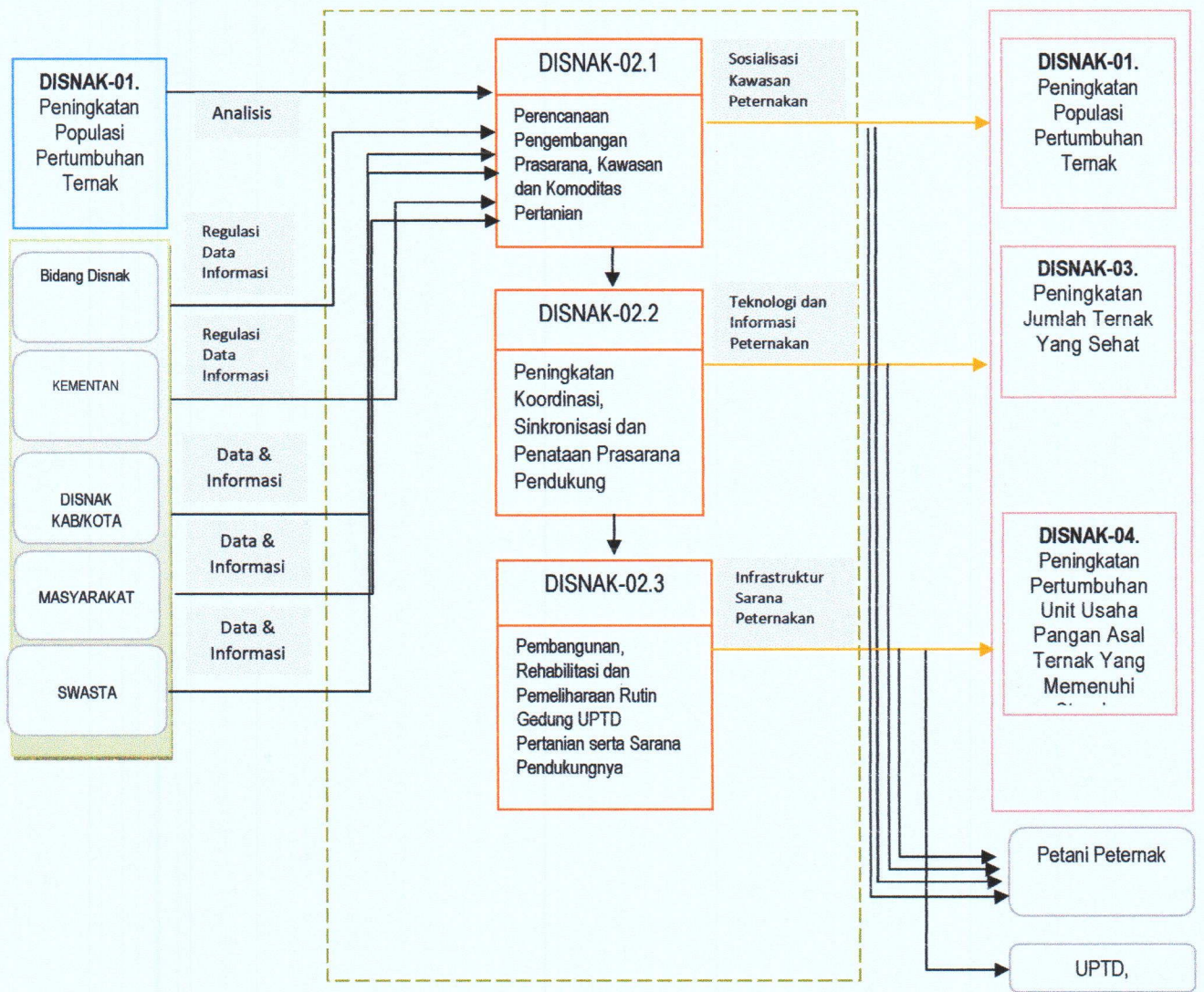
#### 4.5 Peta Sub Proses

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

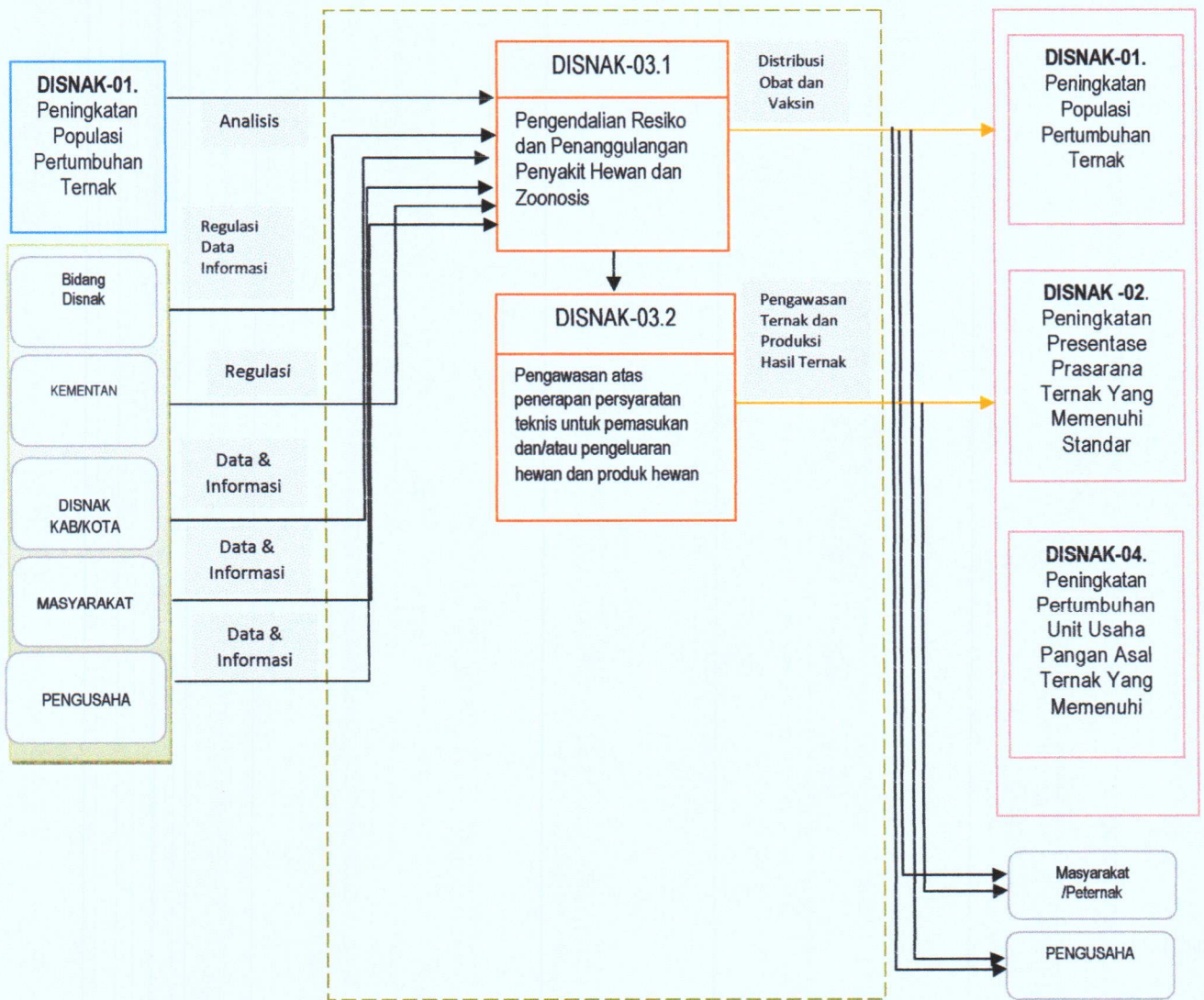
# PETA SUB PROSES DISNAK-01 PENINGKATAN POPULASI PERTUMBUHAN TERNAK



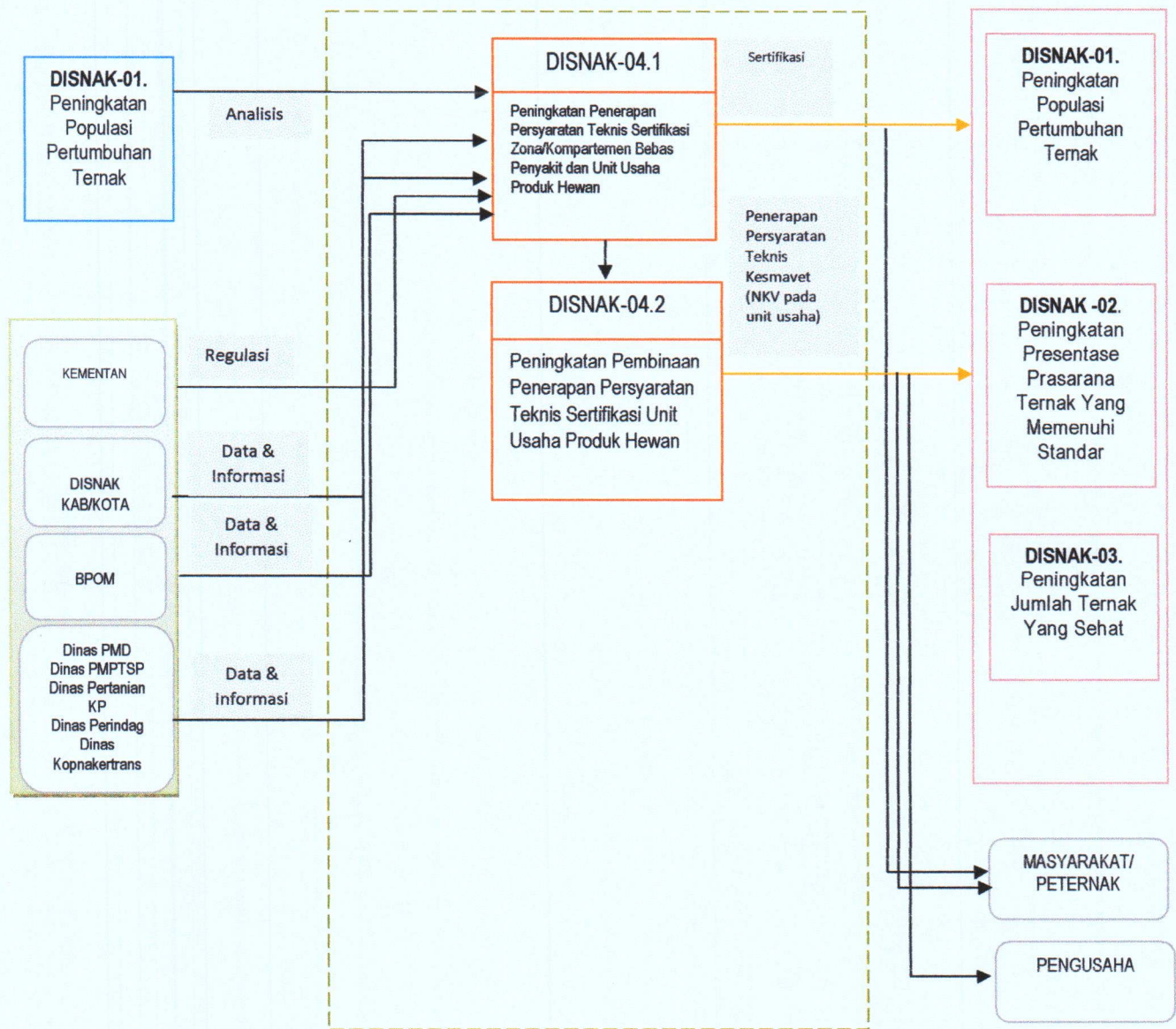
**PETA SUB PROSES**  
**DISNAK-02 PENINGKATAN PRESENTASE PRASARANA TERNAK YANG MEMENUHI STANDAR**



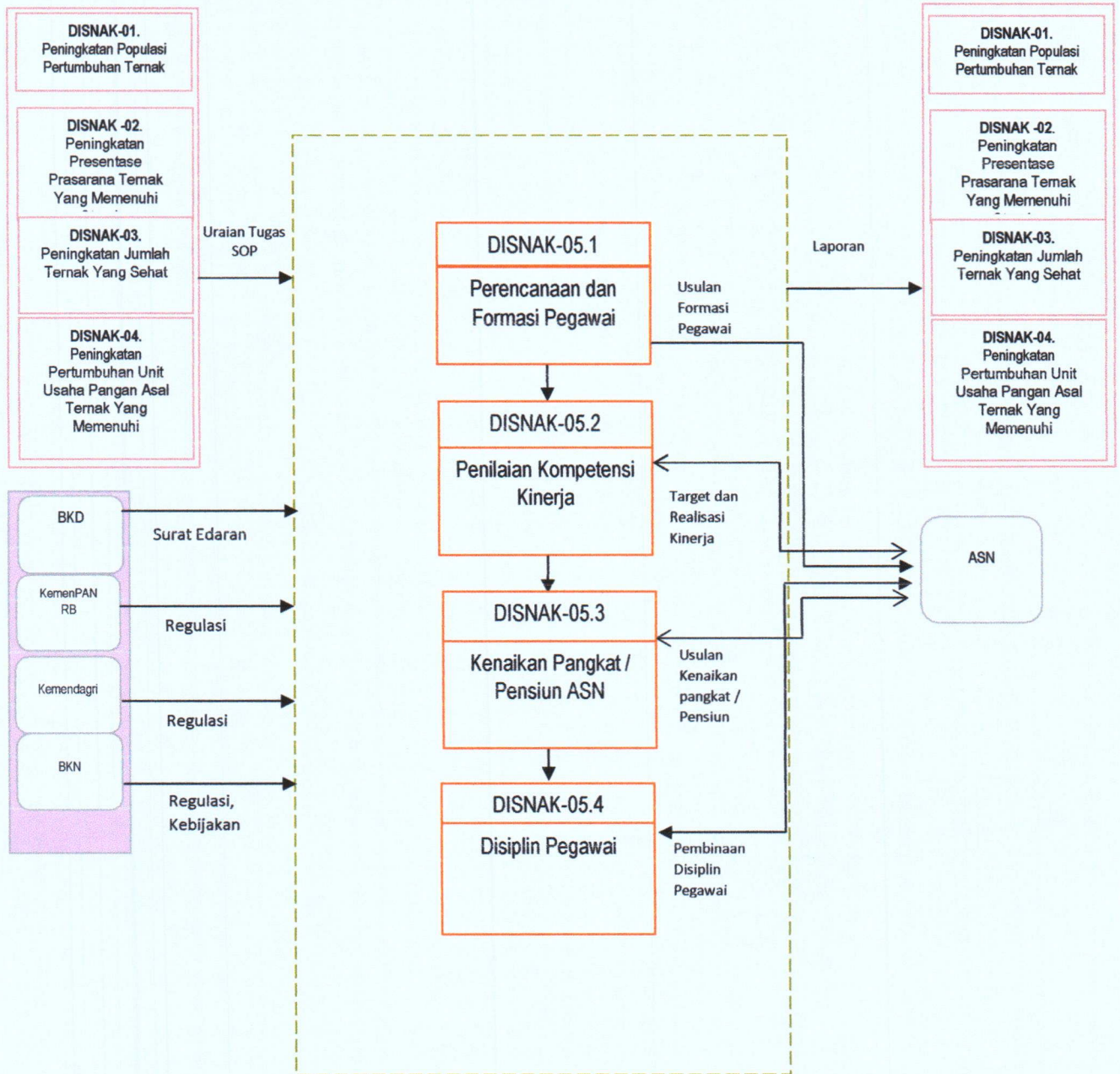
## PETA SUB PROSES DISNAK-03 PENINGKATAN JUMLAH TERNAK YANG SEHAT



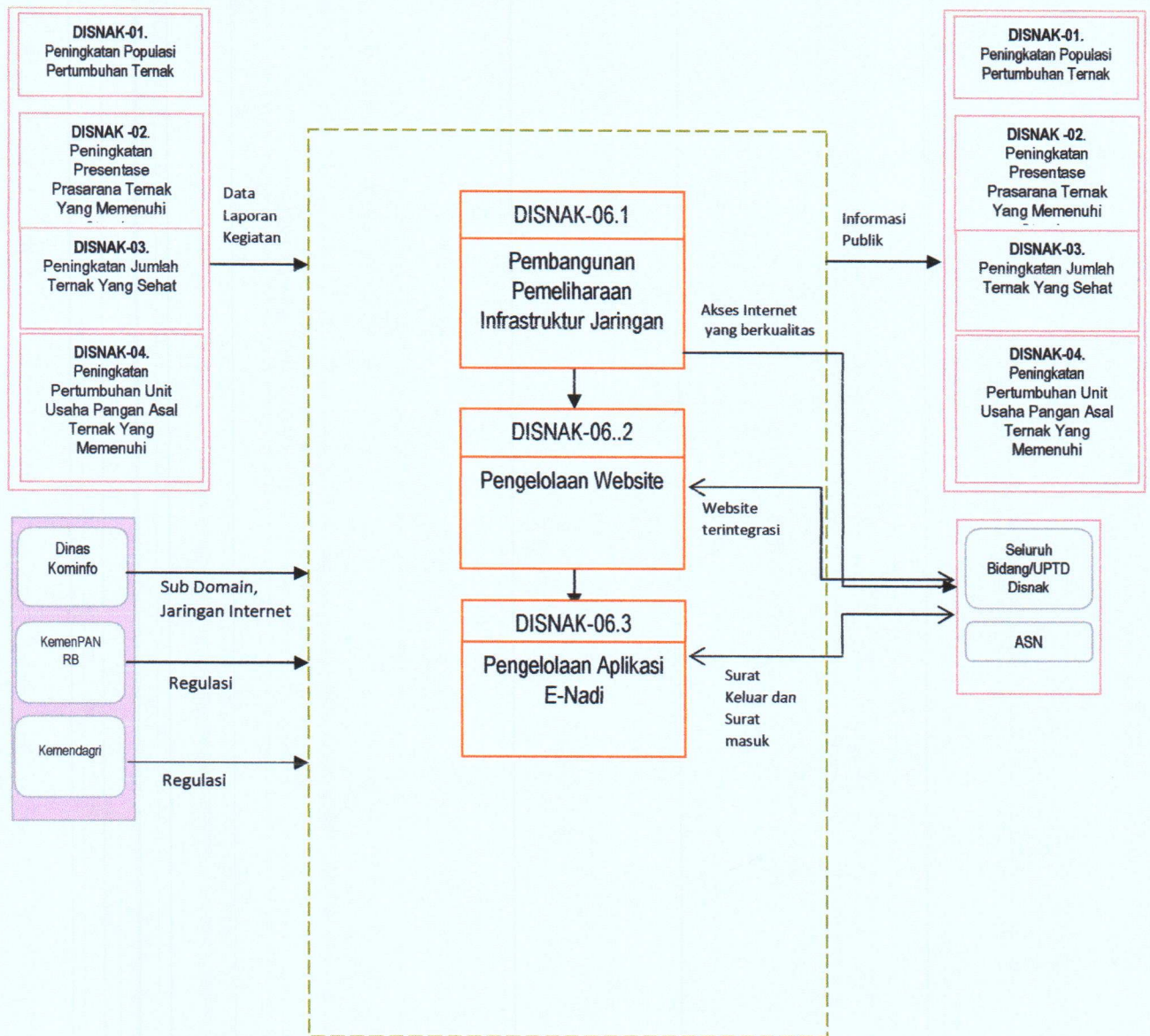
**PETA SUB PROSES**  
**DISNAK-04 PENINGKATAN PERTUMBUHAN UNIT USAHA PANGAN ASAL TERNAK**  
**YANG MEMENUHI STANDAR**



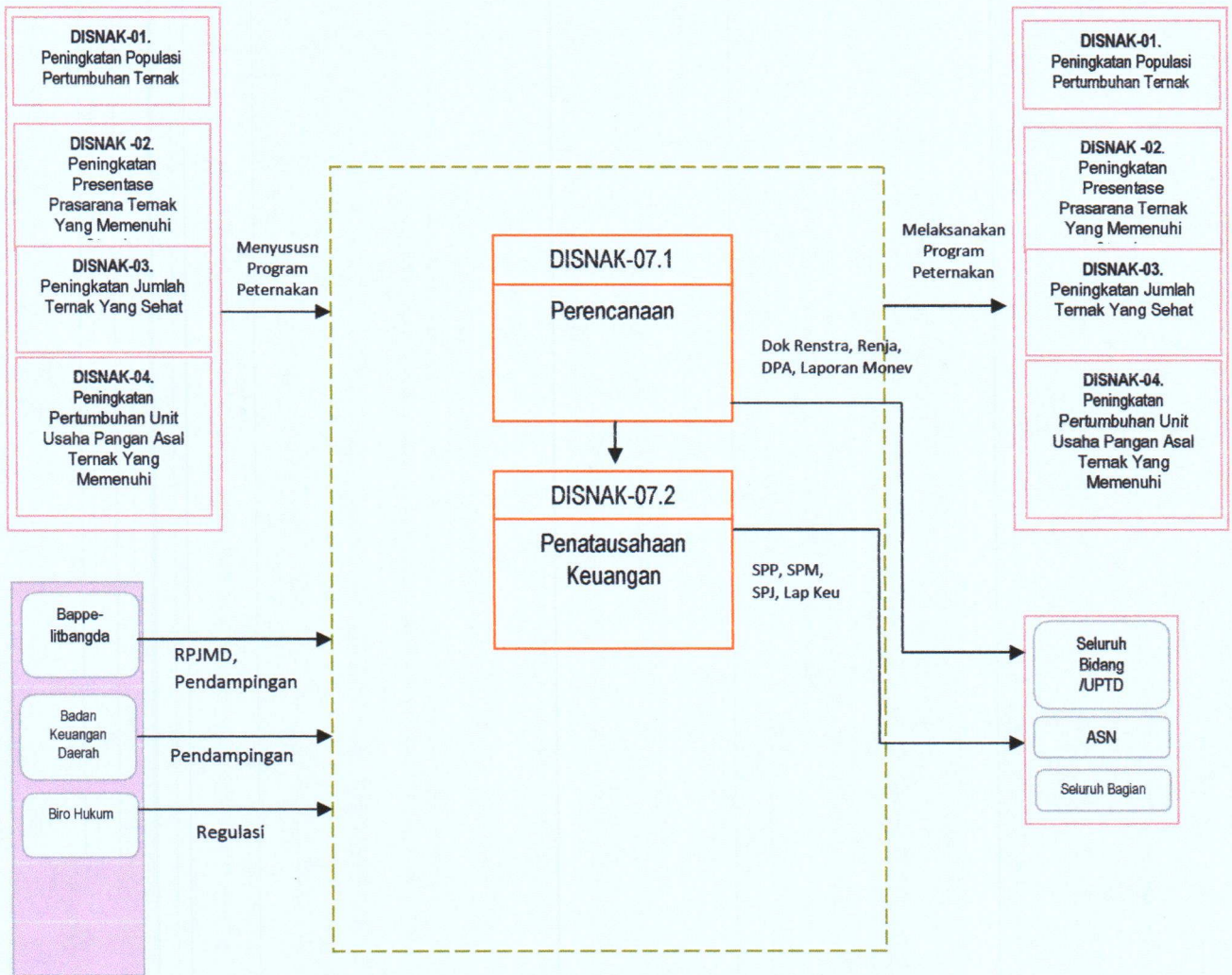
## PETA SUB PROSES DISNAK-05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM



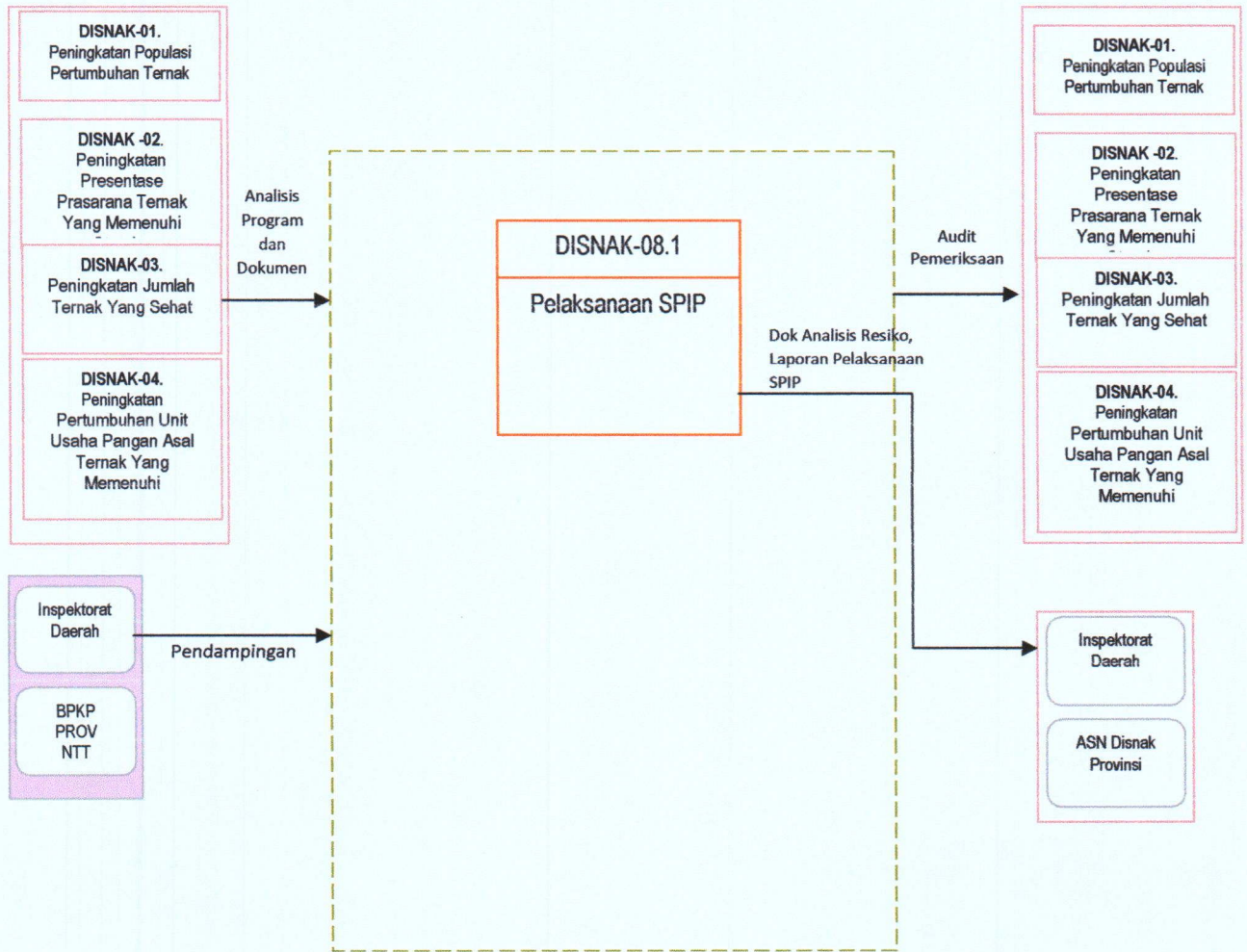
## PETA SUB PROSES DISNAK-06. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



## PETA SUB PROSES DISNAK-07. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

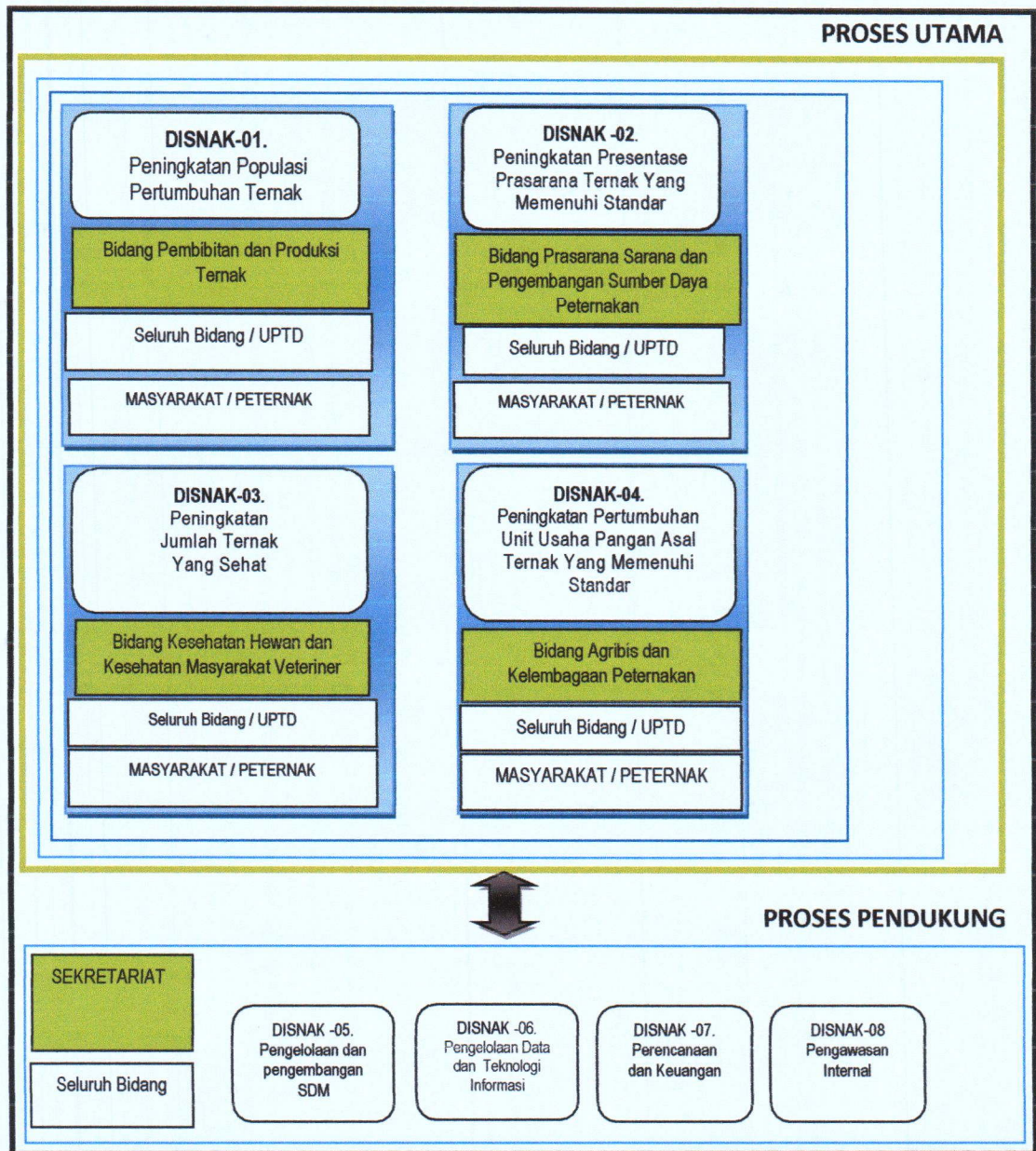


**PETA SUB PROSES  
DISNAK-08. PENGAWASAN INTERNAL**



#### 4.6. Peta Relasi (*Relationship Map*)

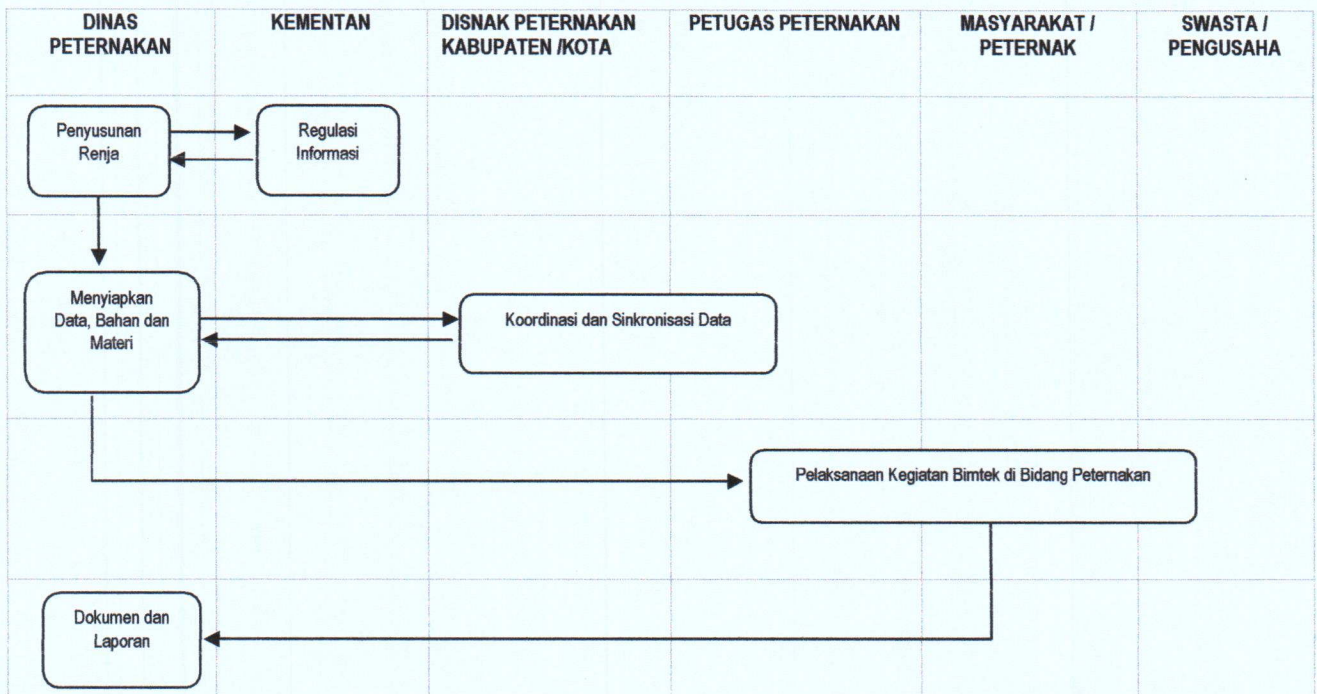
Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.



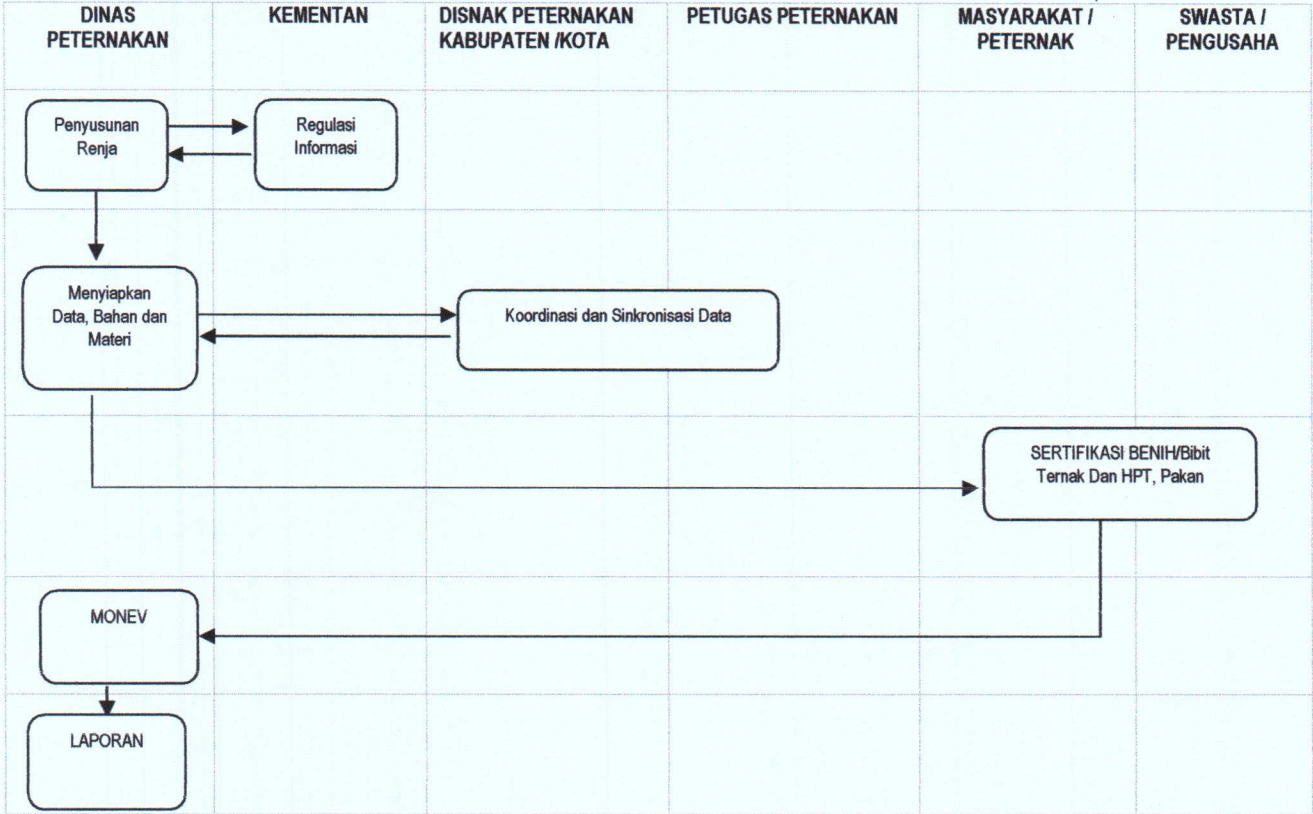
#### 4.7. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map)

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

**DISNAK-01.1**  
**PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN**

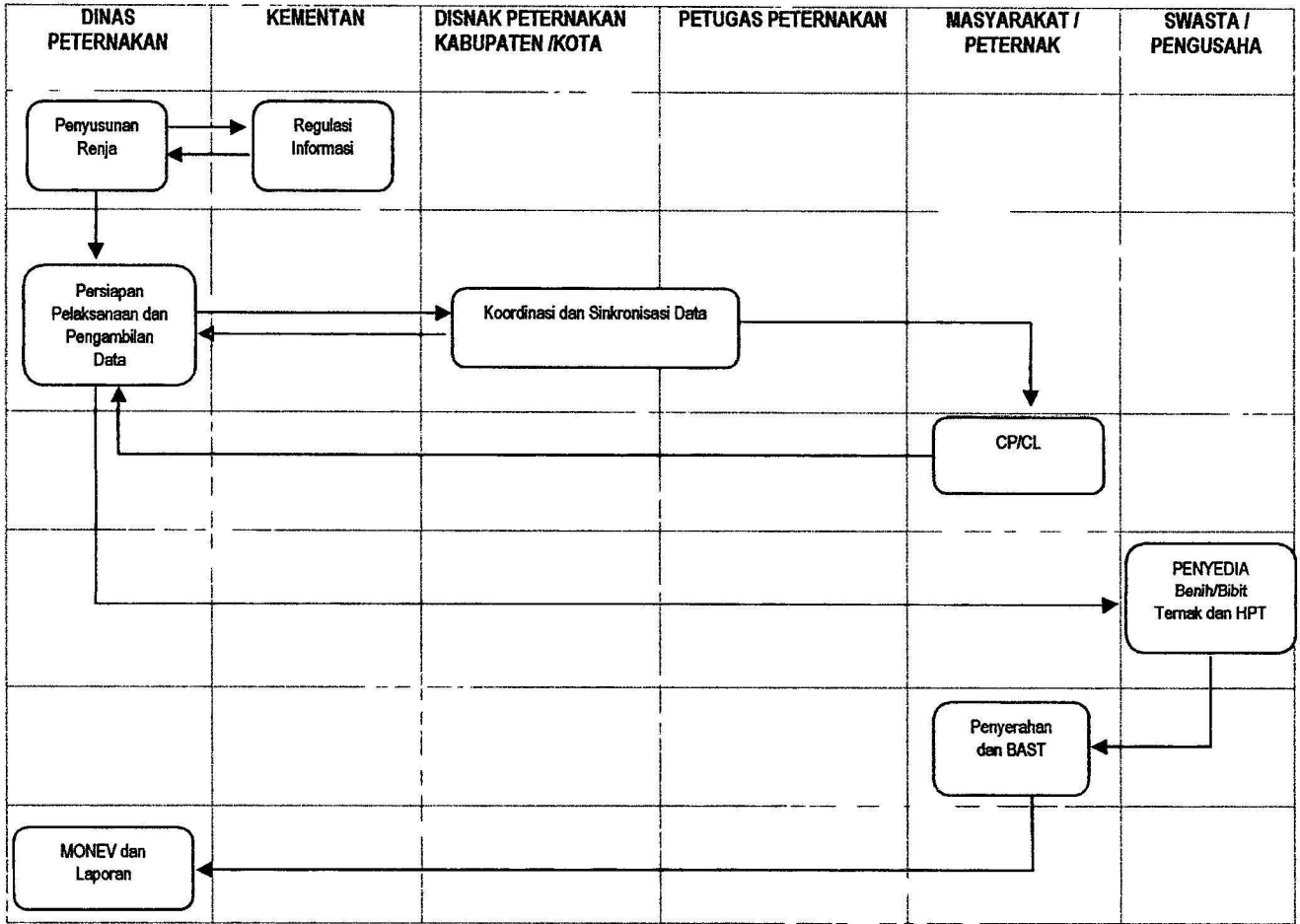


**DISNAK-01.2**  
**PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN**  
**BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN**

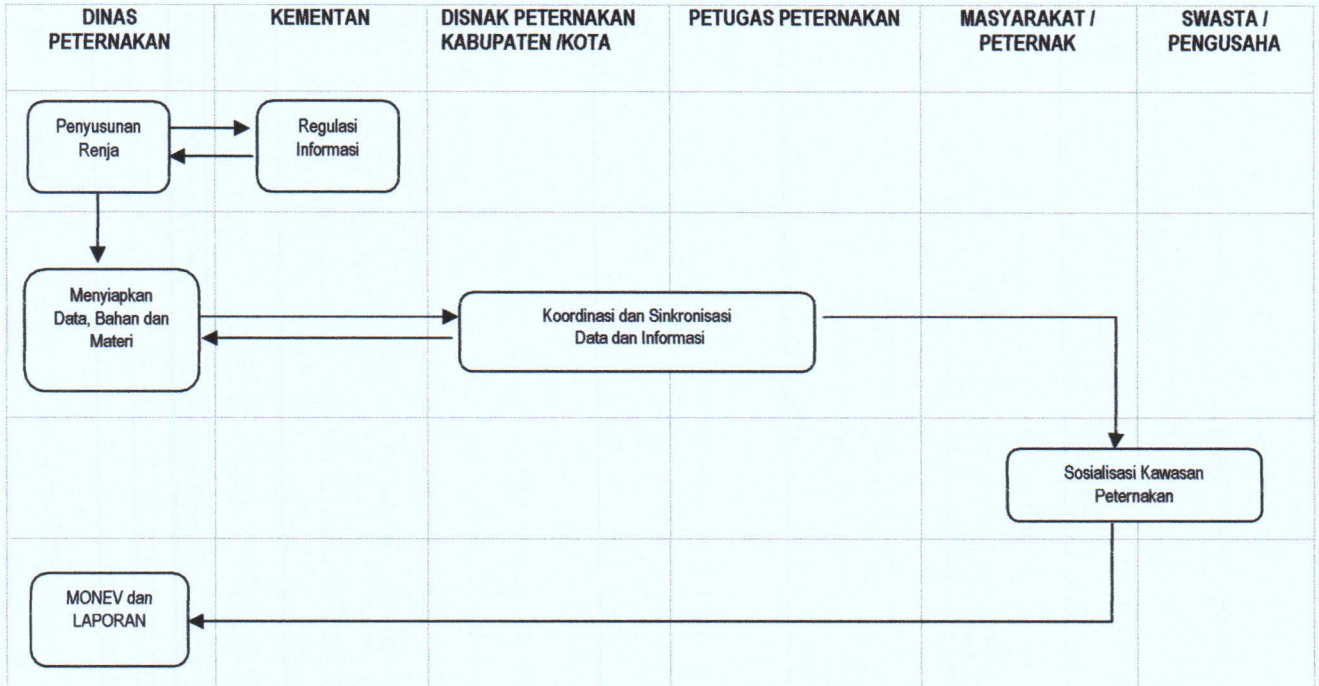


6

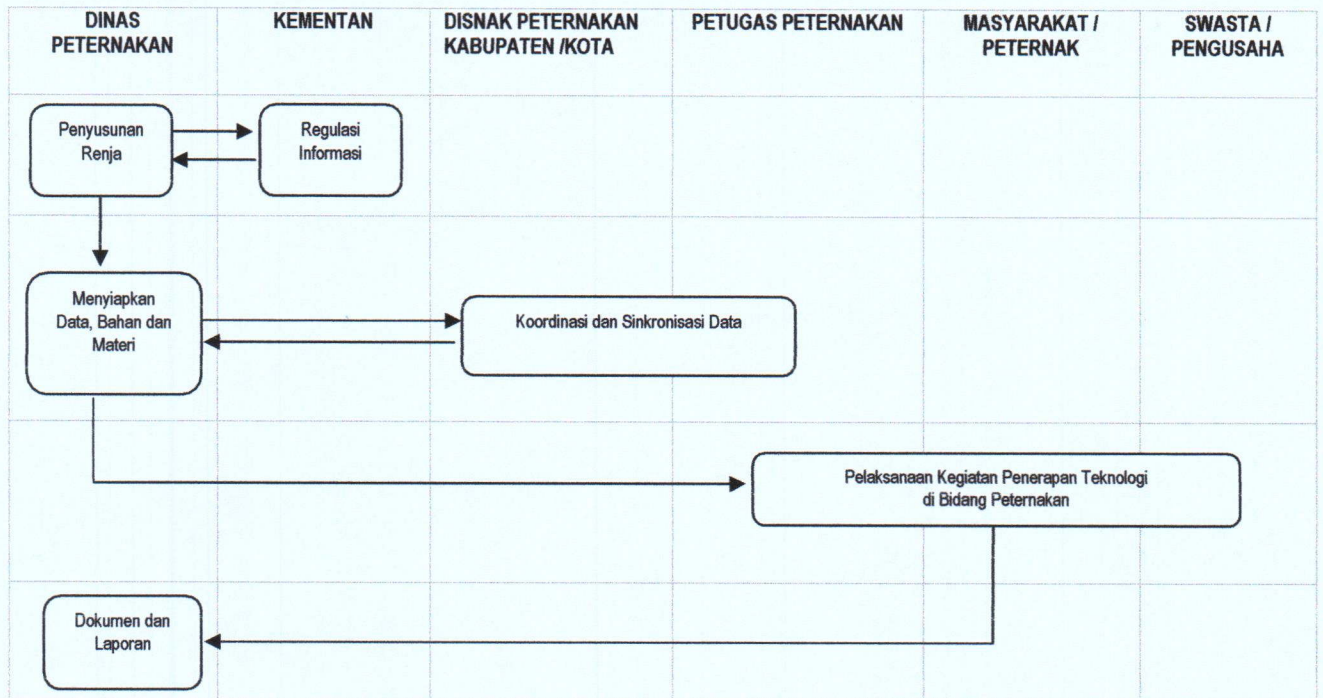
**DISNAK-01.3**  
**PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**



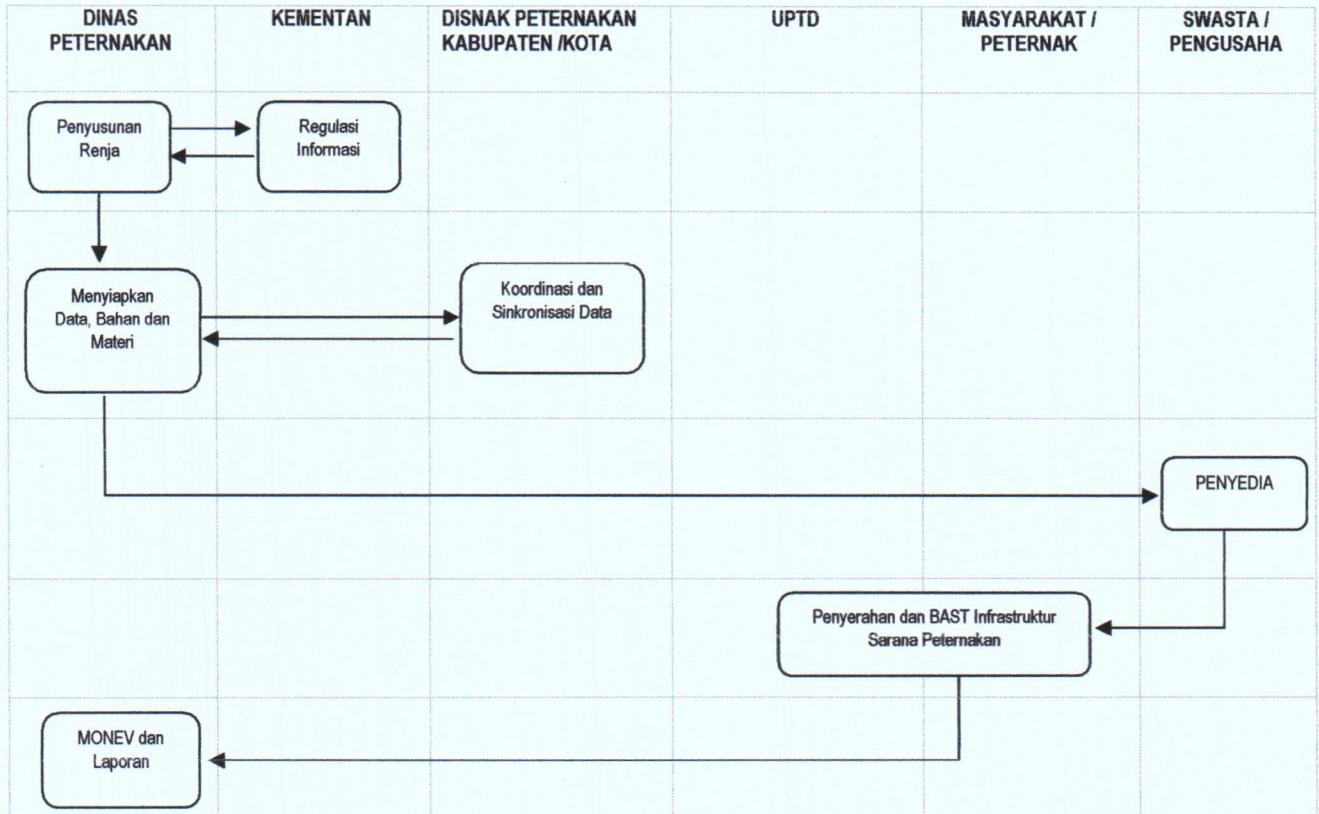
**DISNAK-02.1**  
**PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN**



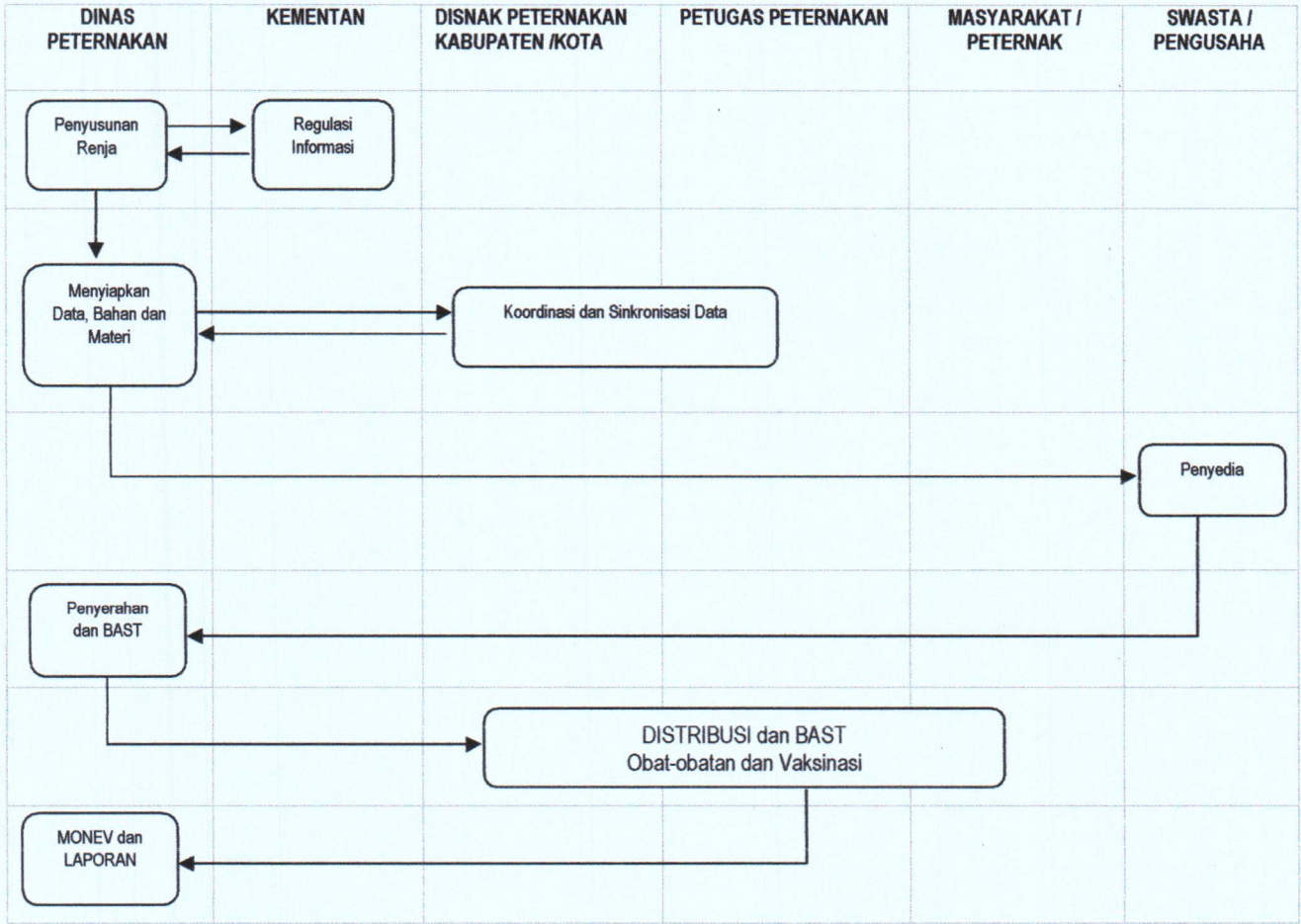
**DISNAK-02.2**  
**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENATAAN PRASARANA PENDUKUNG**



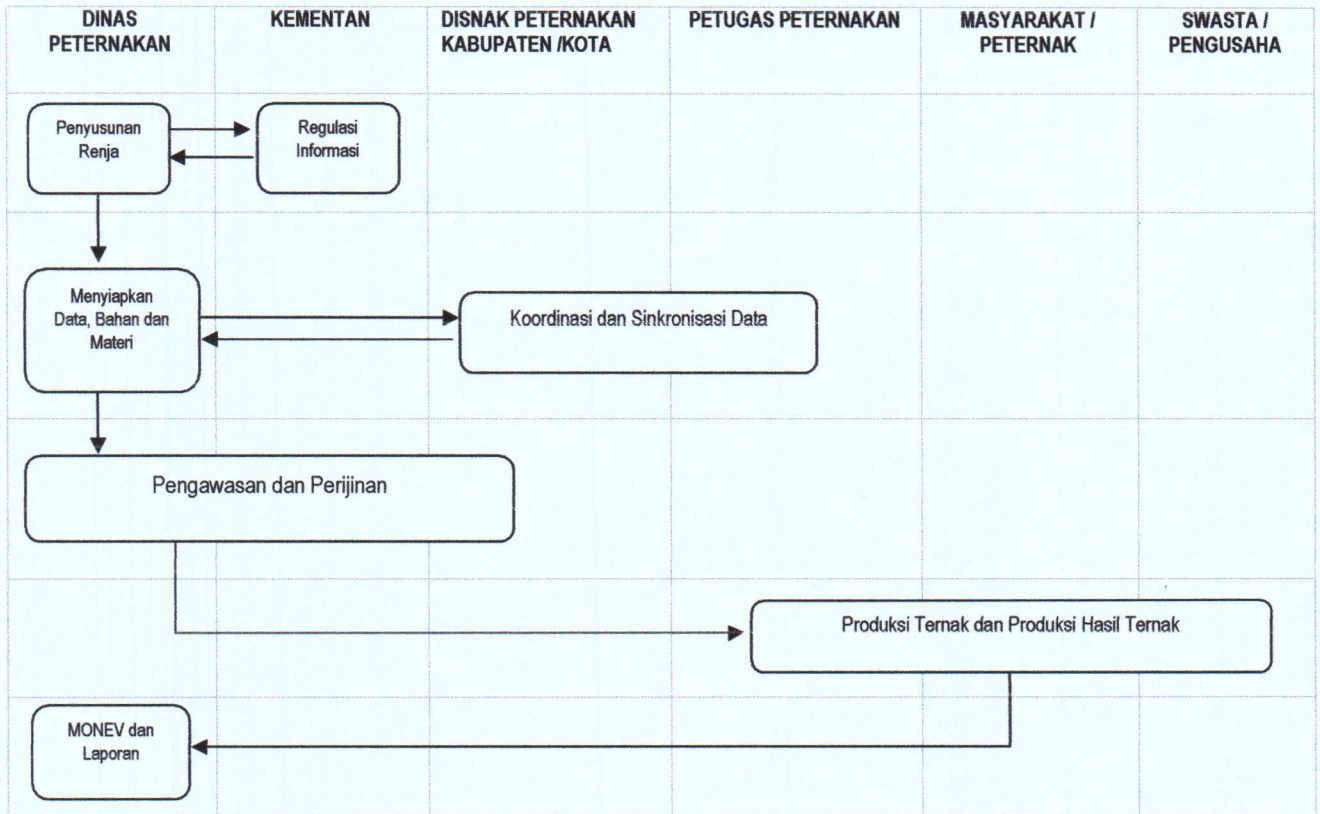
**DISNAK-02.3**  
**PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG UPTD PERTANIAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA**



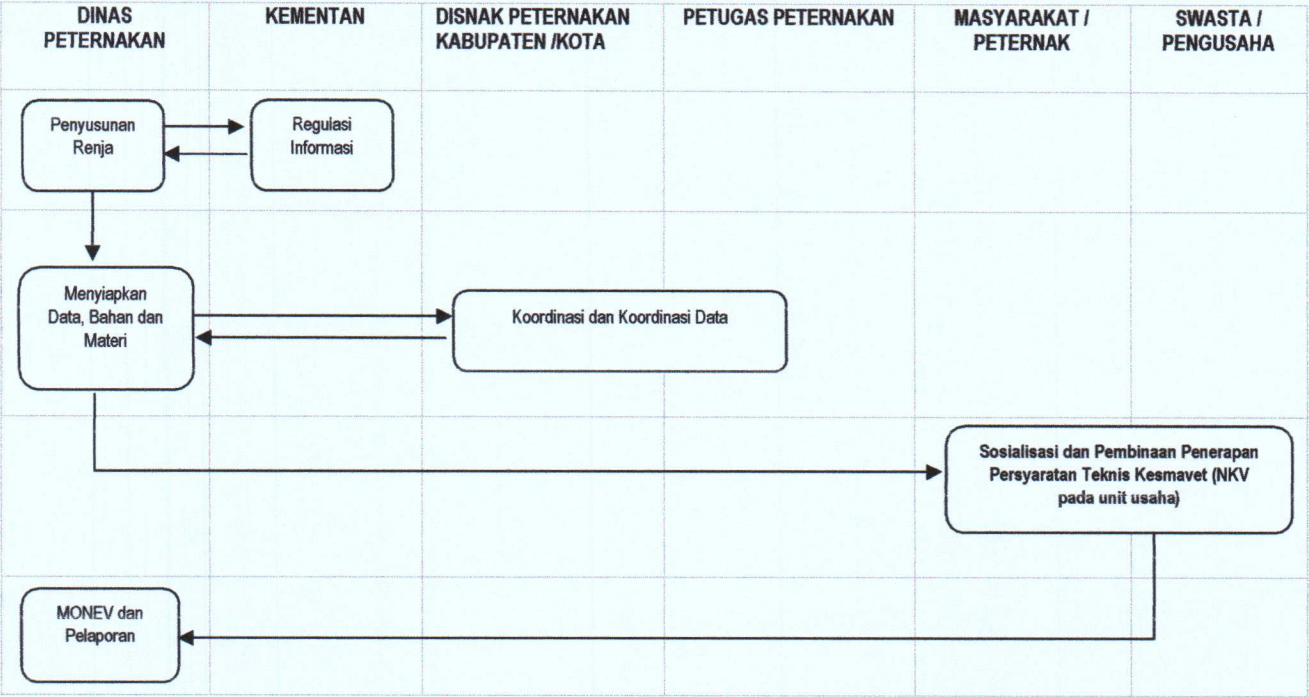
**DISNAK-03.1**  
**PENGENDALIAN RESIKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS**



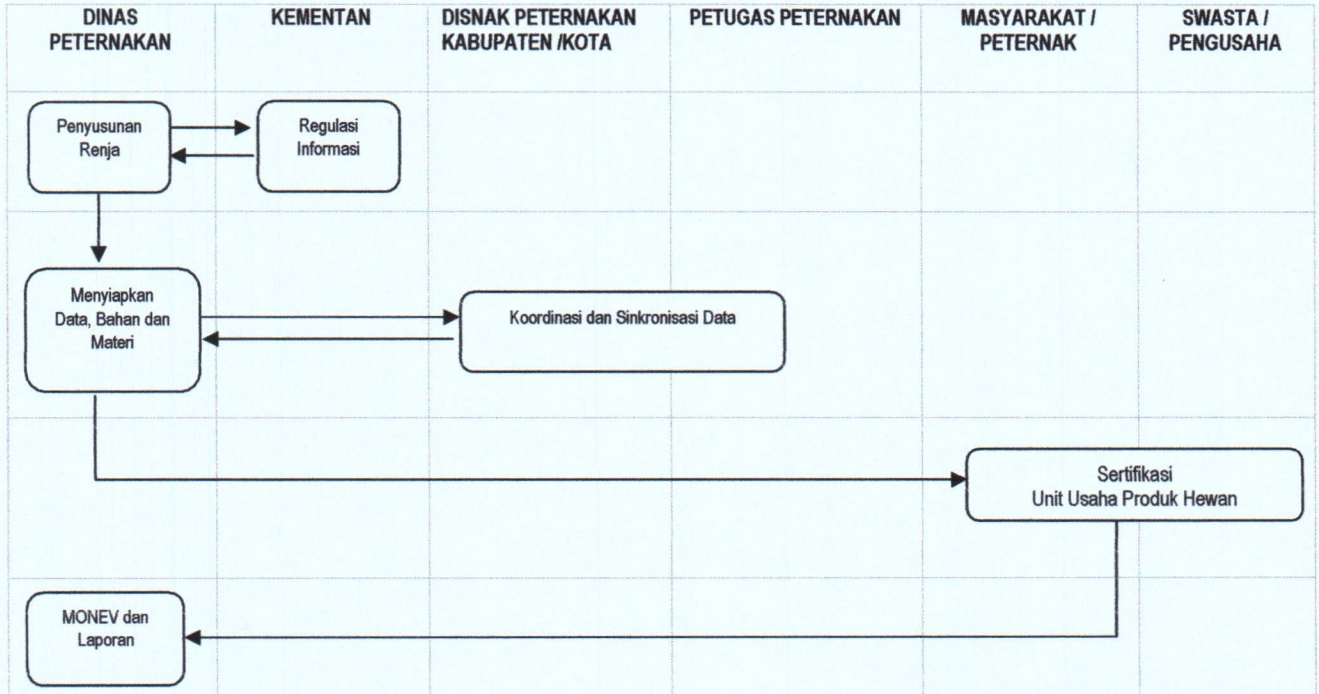
**DISNAK-03.2**  
**PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU**  
**PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN**



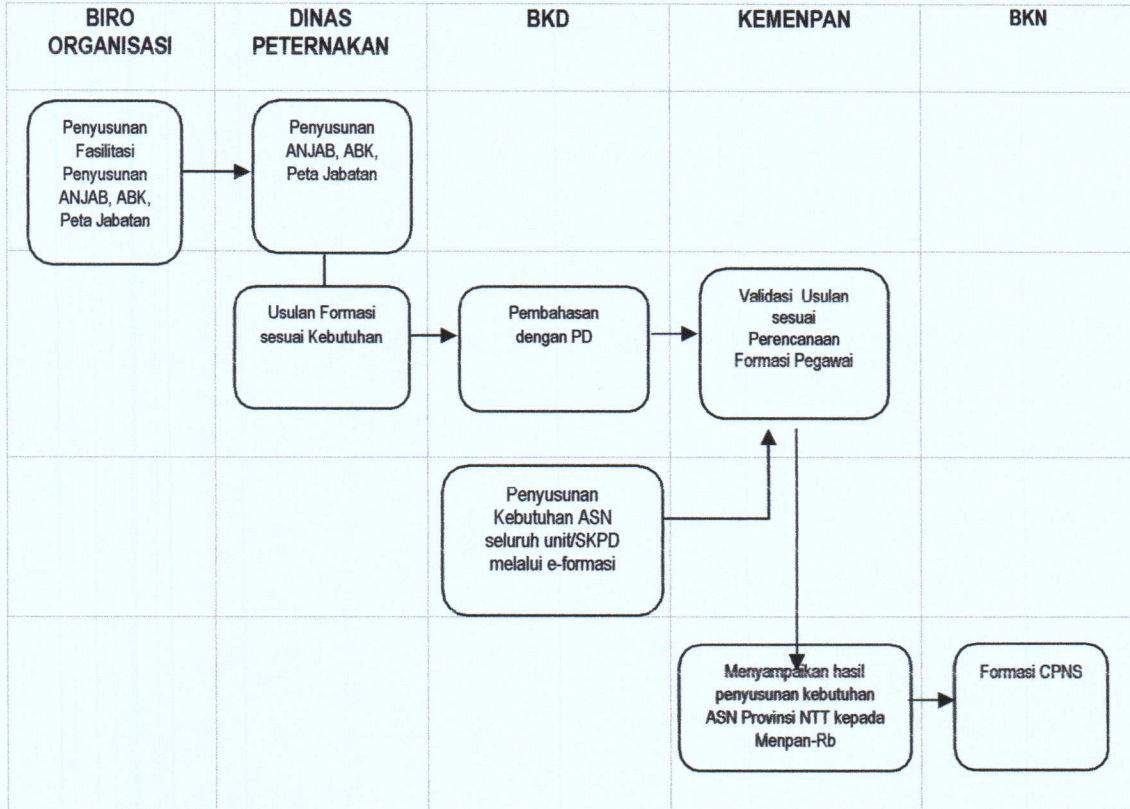
**DISNAK-04.1**  
**PENINGKATAN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS**  
**PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN**



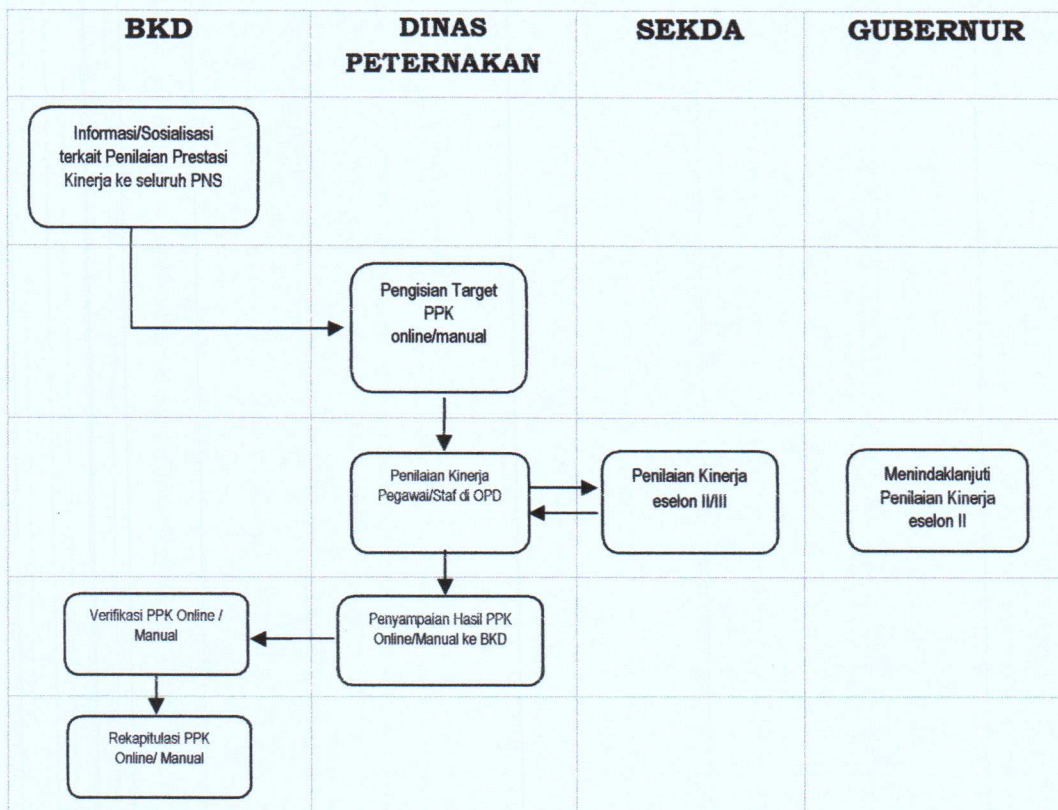
**DISNAK-04.2**  
**PENINGKATAN PEMBINAAN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI**  
**UNIT USAHA PRODUK HEWAN**



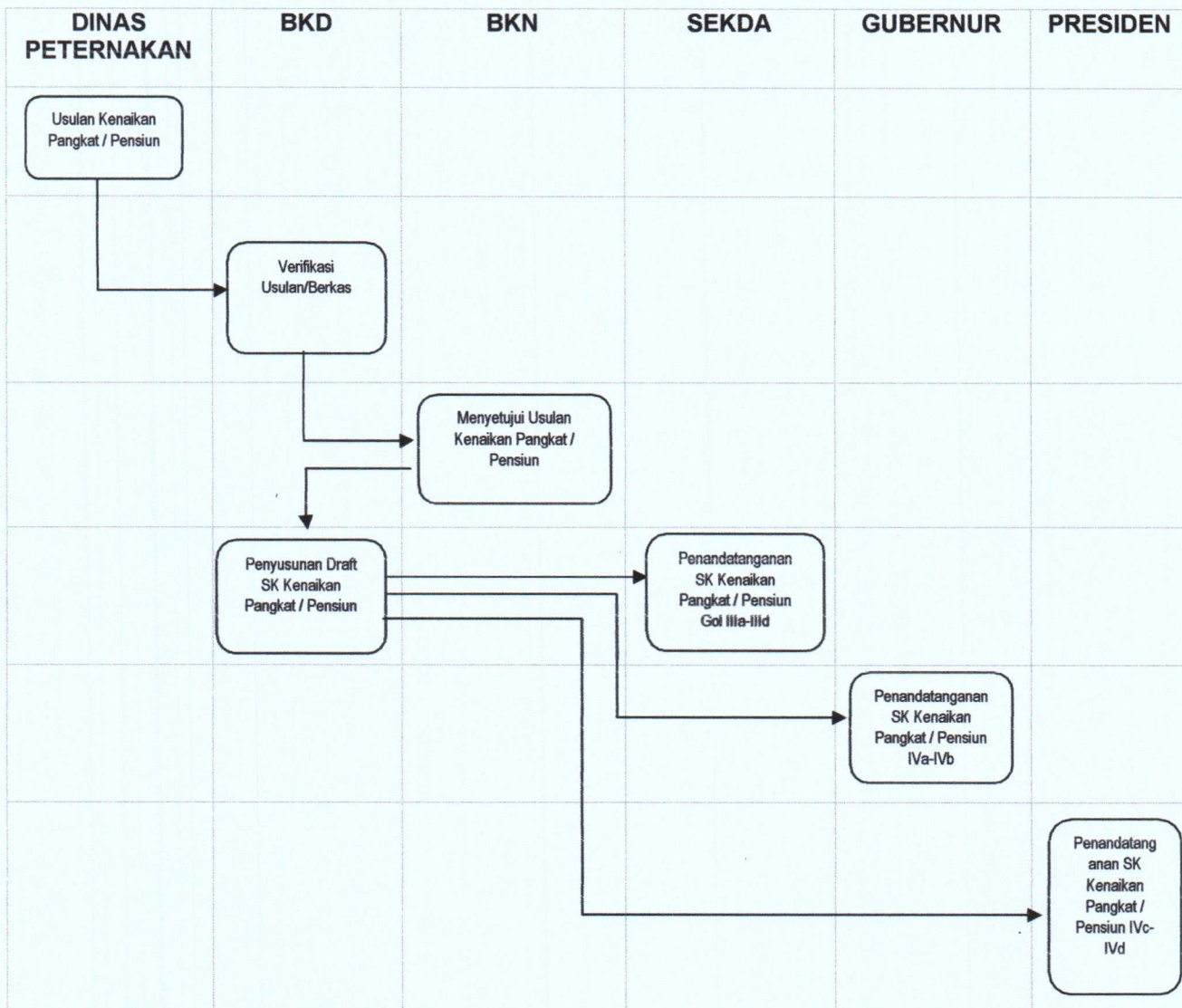
**DISNAK-05.1  
PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI**



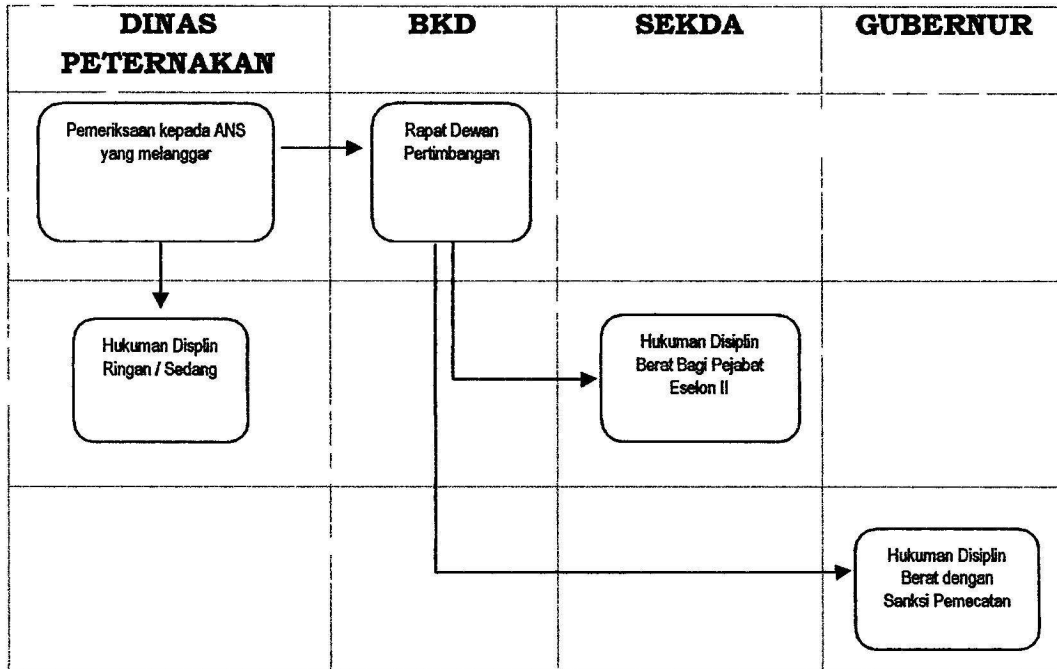
**DISNAK-05.2**  
**PENILAIAN PRESTASI KINERJA**



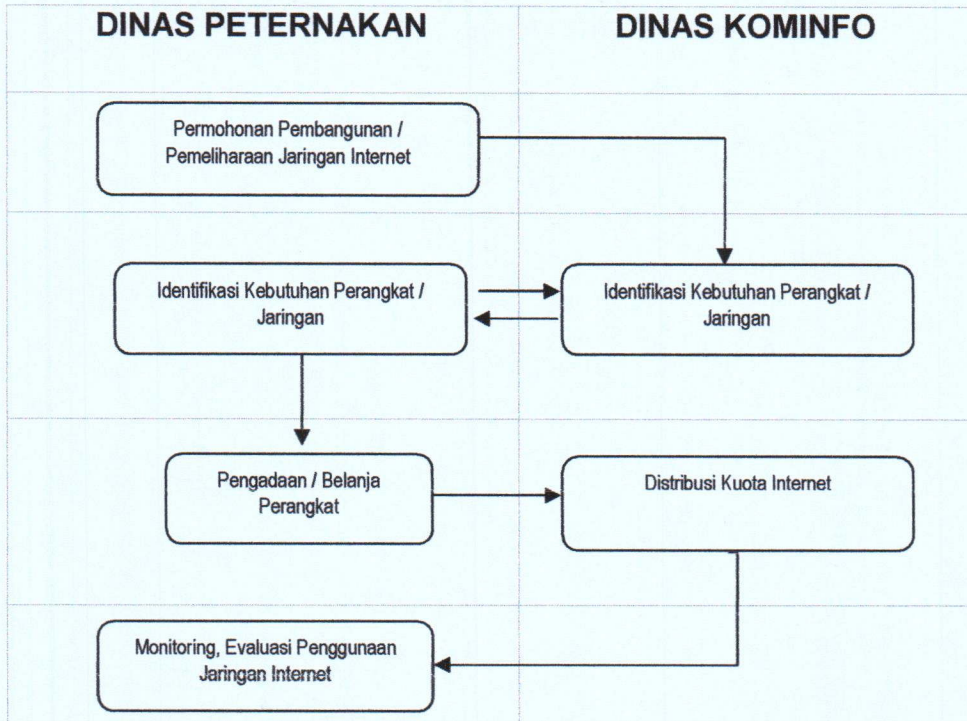
**DISNAK-05.3**  
**KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN**



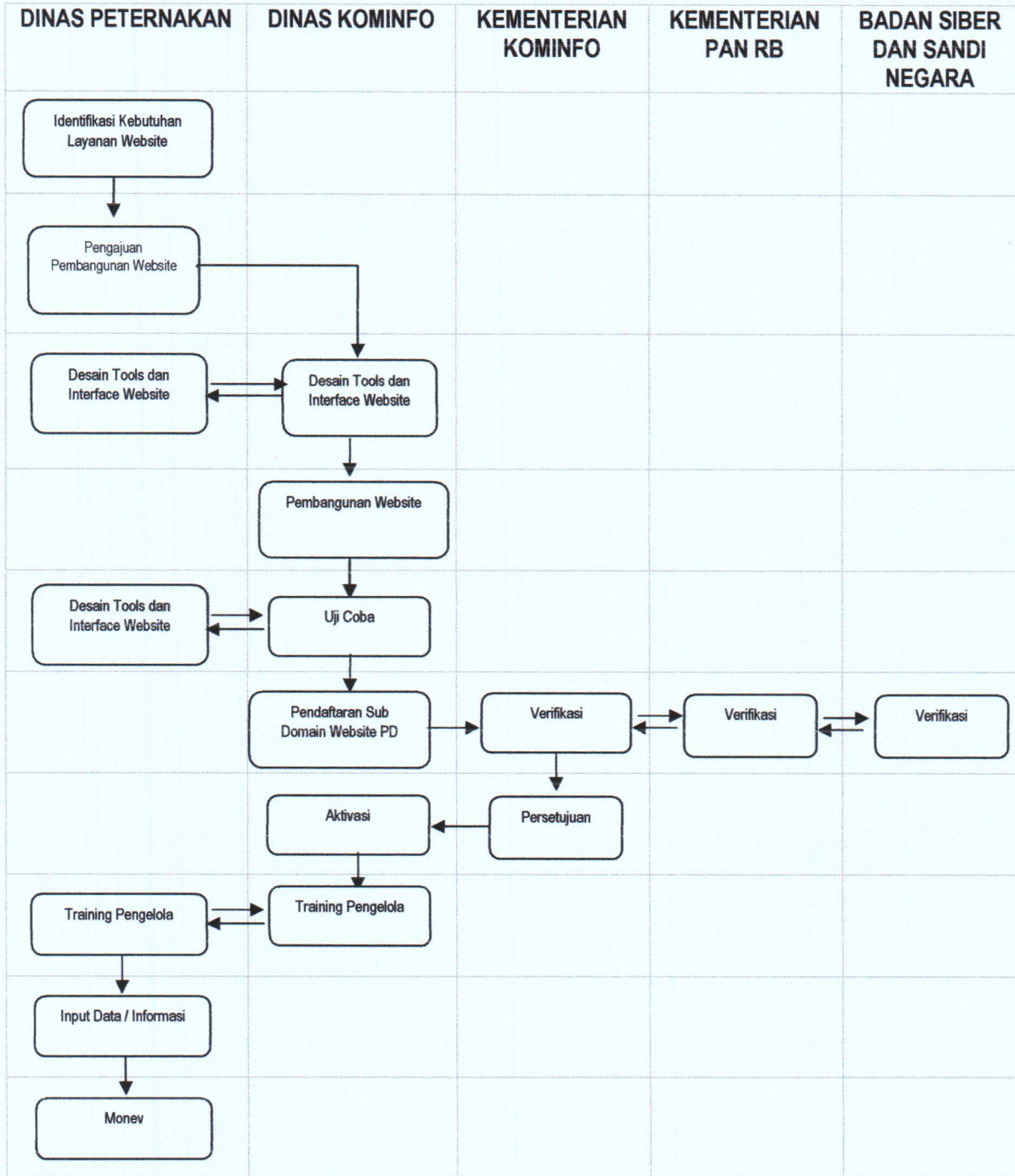
**DISNAK-05.4  
DISIPLIN PEGAWAI**



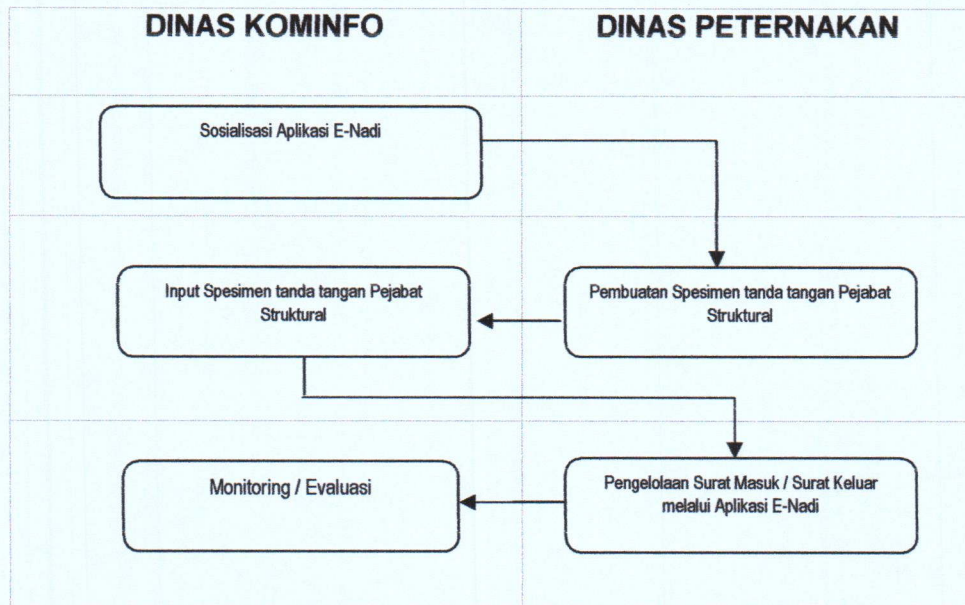
**DISNAK-06.1**  
**PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET**



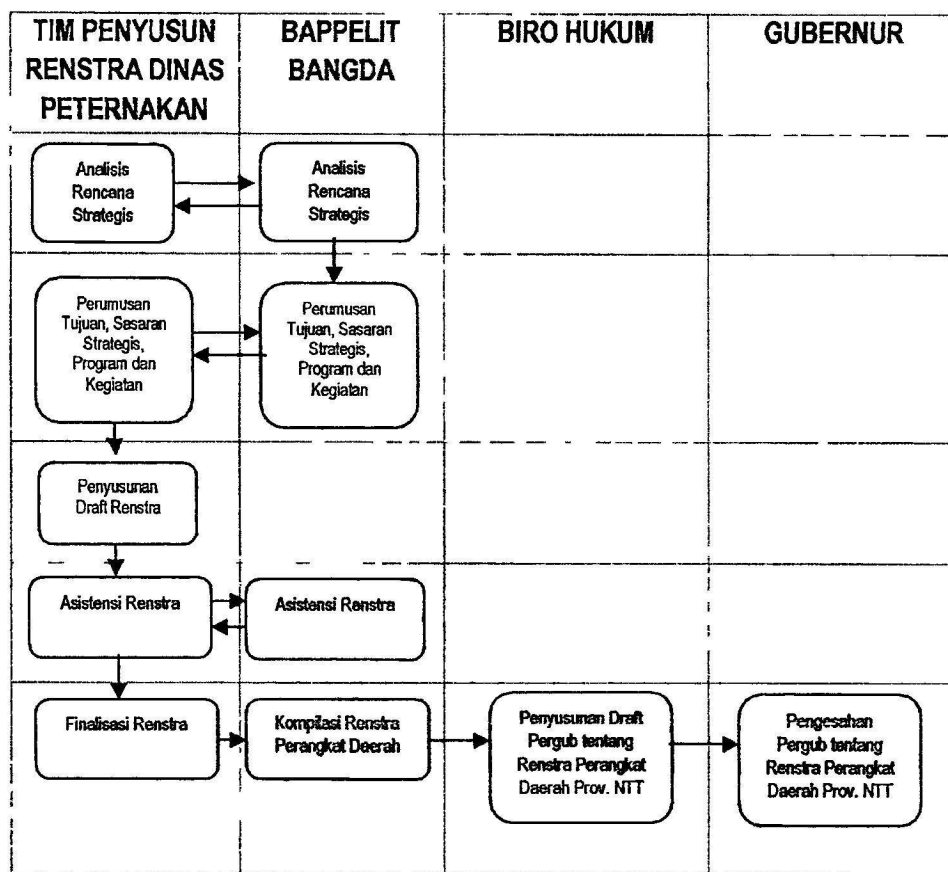
**DISNAK-06.2  
PENGELOLAAN WEBSITE**



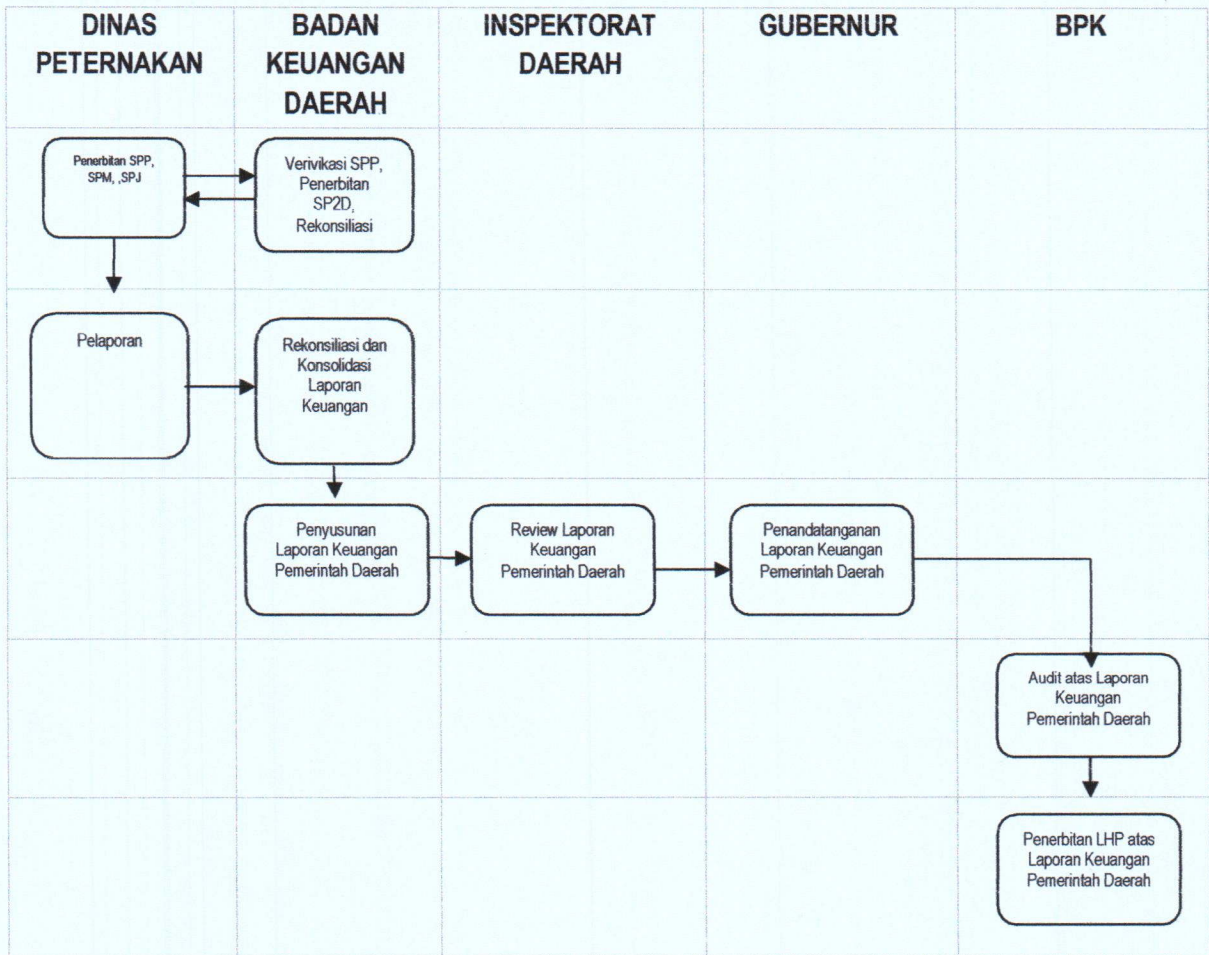
**DISNAK-06.3**  
**PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI**



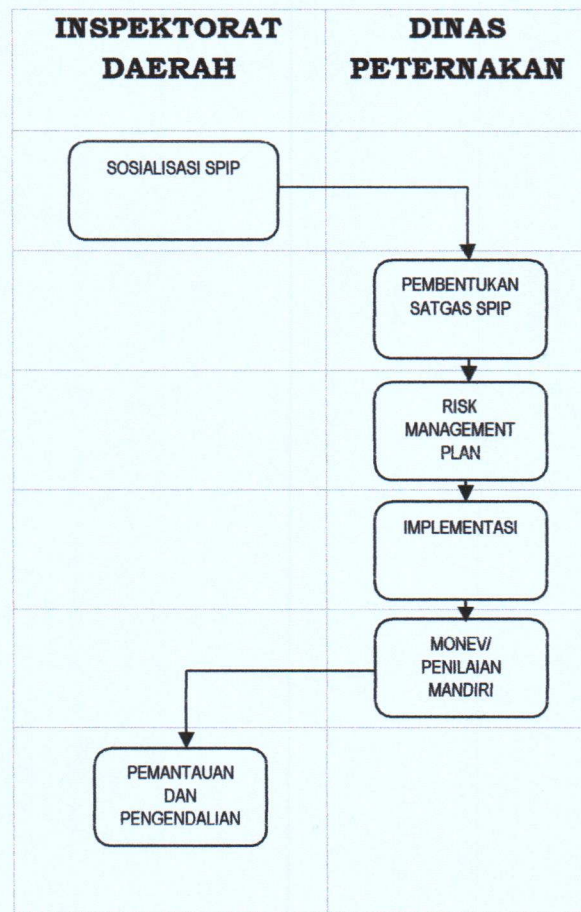
**DISNAK-07.1  
PERENCANAAN**



**DISNAK-07.2  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN**



**DISNAK-08.1  
PELAKSANAAN SPIP**



1

## **BAB VI**

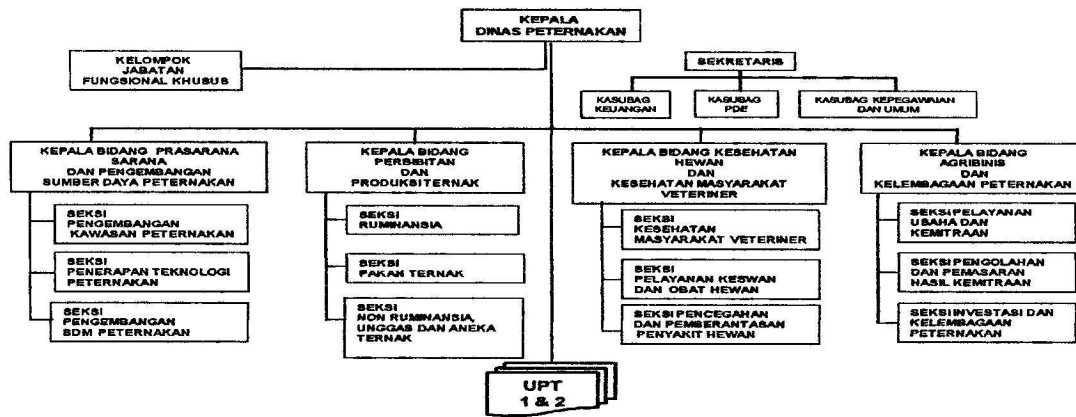
### **PENUTUP**

Penyusunan peta proses bisnis pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gambaran pelayanan terhadap pelanggan yang berada di Dinas maupun sampai di level UPT, tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah berkoordinasi secara baik kepada pihak internal maupun eksternal, mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan serta memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci maka dapat tercapainya visi, misi, dan tujuan.

Semoga dengan penyusunan tersebut dapat memberikan gambaran terhadap peta proses bisnis di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

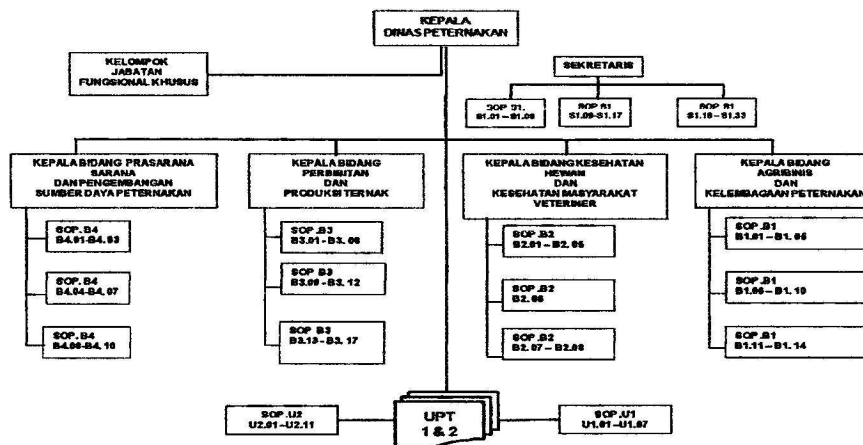
Lampiran 1. Peta SOP

STRUKTUR DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

PETA SOP DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lampiran 2. Proses Utama Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Melalui Program dan Kegiatan Prioritas untuk Peta Relasi Antar Bidang Dinas Peternakan Provinsi NTT

<b>PETA RELASI ANTAR BIDANG DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB<ol style="list-style-type: none"><li>a) Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas</li><li>b) Peningkatan Presentase Prasarana Ternak yang Memenuhi Standar</li><li>c) Peningkatan Jumlah Ternak yang Sehat</li></ol></li><li>2. Peningkatan Unit Usaha Pangan Asal Ternak yang Memenuhi Standar<ol style="list-style-type: none"><li>a) Peningkatan Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Ternak yang Memenuhi Standar</li></ol></li></ol>	
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan SARANA Pertanian (di bidang Peternakan):</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak</li><li>2) Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan</li><li>3) Sekretariat</li><li>4) UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak</li><li>5) Jabatan Fungsional Khusus</li></ol>
<b>Program Penyedia dan Pengembangan PRASARANA Pertanian (di bidang Peternakan):</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak</li><li>2) Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan</li><li>3) Sekretariat</li><li>4) UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak</li><li>5) Jabatan Fungsional Khusus</li></ol>
<b>Program Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang Keswan dan Kesmavet</li><li>2) UPT Veteriner</li><li>3) Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan</li><li>4) Jabatan Fungsional Khusus</li></ol>

**Lampiran 3. Identifikasi Sub Proses Bidang Dinas Peternakan Provinsi NTT**

No	SUB PROSES	KODE SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI	OUTPUT
1	<b>PENINGKATAN POPULASI PERTUMBUHAN TERNAK</b>	<b>DISNAK01</b>			<b>Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak &gt; 6%</b>
	Program Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISNAK01.01	Peningkatan. Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	DISNAK01.01	BIMTEK
			Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	DISNAK01.02	Sertifikasi Bibit/Benh Ternak dan HPT
			Peningkatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	DISNAK01.03	Penyediaan Benih/Bibit Ternak
2	<b>TERCAPAINYA PENINGKATAN PRESENTASE PRASARANA TERNAK YANG MEMENUHI STANDAR</b>	<b>DISNAK02</b>			<b>Tercapainya Peningkatan Presentase Prasarana Ternak Yang Memenuhi Standar</b>
	Program Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISNAK02.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	DISNAK02.01	Sosialisasi Kawasan Peternakan
			Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	DISNAK02.02	Teknologi dan Informasi Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	DISNAK02.03	Infrastruktur Sarana Peternakan
3	<b>TERCAPAINYA PENINGKATAN PRESENTASE JUMLAH TERNAK YANG SEHAT</b>	<b>DISNAK03</b>			<b>Tercapainya Peningkatan Presentase Jumlah Ternak Yang Sehat</b>
	Program Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISNAK03.01	Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah	DISNAK03.01	Distribusi Obat dan Vaksin

			Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
			Peningkatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	<b>DISNAK03..02</b>	Pengawasan Ternak dan Produksi Hasil Ternak
<b>4</b>	<b>TERCAPAINYA PENINGKATAN JUMLAH UNIT USAHA PANGAN ASAL TERNAK YANG MEMENUHI STANDAR.</b>	<b>DISNAK04</b>			Tercapainya Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Ternak Yang Memenuhi Standar.
	Program Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<b>DISNAK03.01</b>	Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<b>DISNAK04.01</b>	Sertifikasi
			Peningkatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	<b>DISNAK04.02</b>	Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet (NKV pada unit usaha

Lampiran 4. Identifikasi Lintas Fungsi Bidang Dinas Peternakan Provinsi NTT

**LINTAS FUNGSI DISNAK 01**

Identifikasi Lintas Fungsi				
<b>PROSES ( Kode Proses)</b>		: DISNAK .01		
<b>SUB PROSES(Kode Sub Proses)</b>		: DISNAK .01.01		
<b>LINTAS FUNGSI (Kode Lintas Fungsi)</b>		: DISNAK .01.01.01		
No	Kegiatan / Aktifitas	Unit Kerja Terkait / Bidang Kerja	OUTPUT	Unit Bidang Penanggung Jawab
1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak > 6%	BITPRO, AGRIBISNIS, PSP
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta pakan	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak > 6%	AGRIBISNIS,

Identifikasi Lintas Fungsi				
<b>PROSES ( Kode Proses)</b>		: DISNAK .01		
<b>SUB PROSES(Kode Sub Proses)</b>		: DISNAK .01.01		
<b>LINTAS FUNGSI (Kode Lintas Fungsi)</b>		: DISNAK .01.01.02		
No	Kegiatan / Aktifitas	Unit Kerja Terkait / Bidang Kerja	OUTPUT	Unit Bidang Penanggung Jawab
1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak > 6%	BITPRO, AGRIBISNIS, PSP
2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak > 6%	BITPRO
3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak > 6%	BITPRO

Identifikasi Lintas Fungsi				
<b>PROSES ( Kode Proses)</b>		: DISNAK .01		
<b>SUB PROSES(Kode Sub Proses)</b>		: DISNAK .01.01		
<b>LINTAS FUNGSI (Kode Lintas Fungsi)</b>		: DISNAK .01.01.03		
No	Kegiatan / Aktifitas	Unit Kerja Terkait / Bidang Kerja	OUTPUT	Unit Bidang Penanggung Jawab
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak > 6%	UPT 1

## Identifikasi Lintas Fungsi DISNAK 02.

### LINTAS FUNGSI DISNAK 02

Identifikasi Lintas Fungsi				
PROSES ( Kode Proses)		: DISNAK .02		
SUB PROSES(Kode Sub Proses)		: DISNAK .02.01		
LINTAS FUNGSI (Kode Lintas Fungsi)		: DISNAK .02.01.01		
No	Kegiatan / Aktifitas	Unit Kerja Terkait / Bidang Kerja	OUTPUT	Unit Bidang Penanggung Jawab
1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya presentase prasarana ternak yang memenuhi standar > 80%	Bidang PSP
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya presentase prasarana ternak yang memenuhi standar > 80%	Bidang PSP
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya presentase prasarana ternak yang memenuhi standar > 80%	Bidang PSP, UPT 1 dan UPT Veteriner

## Identifikasi Lintas Fungsi DISNAK 03.

### LINTAS FUNGSI DISNAK 03

Identifikasi Lintas Fungsi				
PROSES ( Kode Proses)		: DISNAK .03		
SUB PROSES(Kode Sub Proses)		: DISNAK .03.01		
LINTAS FUNGSI (Kode Lintas Fungsi)		: DISNAK .03.01.01		
No	Kegiatan / Aktifitas	Unit Kerja Terkait / Bidang Kerja	OUTPUT	Unit Bidang Penanggung Jawab
1	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya presentase jumlah ternak yang sehat >80%	BidangKeswan & Kesmavet

Identifikasi Lintas Fungsi				
PROSES ( Kode Proses)		: DISNAK .03		
SUB PROSES(Kode Sub Proses)		: DISNAK .03.01		
LINTAS FUNGSI (Kode Lintas Fungsi)		: DISNAK .03.01.02		
No	Kegiatan / Aktifitas	Unit Kerja Terkait / Bidang Kerja	OUTPUT	Unit Bidang Penanggung Jawab
1	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya presentase jumlah ternak yang sehat >80%	AGRIBISNIS

**Identifikasi Lintas Fungsi DISNAK 04.**

**LINTAS FUNGSI DISNAK 04**

Identifikasi Lintas Fungsi				
<b>PROSES ( Kode Proses)</b>		: DISNAK .04		
<b>SUB PROSES(Kode Sub Proses)</b>		: DISNAK .03.01		
<b>LINTAS FUNGSI (Kode Lintas Fungsi)</b>		: DISNAK .04.01.01		
No	Kegiatan / Aktifitas	Unit Kerja Terkait / Bidang Kerja	OUTPUT	Unit Bidang Penanggung Jawab
1	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	SEKRETARIAT PSP, BITPRO, KESWAN, AGRIBISNIS, UPT 1 & UPT 2	Meningkatnya jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar. >30%	Bidang Keswan – Kesmavet UPT Veteriner Sekretariat

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT